

RENCANA KERJA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
TAHUN 2022



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Jalan Lingkar Utara Maron Temanggung  
Telepon 0293-4901790 Surat Elektronik : [datasatpol@gmail.com](mailto:datasatpol@gmail.com)  
Laman : [satpolppdamkar.temanggung.go.id](http://satpolppdamkar.temanggung.go.id)

**HALAMAN VERIFIKASI**

**RENCANA KERJA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
TAHUN 2022**

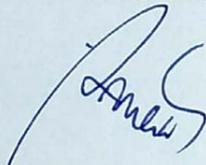
Disusun Oleh :

**TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  
PEMADAM KEBAKARAN TAHUN 2022**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal : 7 September 2021

Koordinator  
Bidang Pembangunan Manusia dan  
Pemerintahan



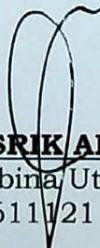
**RINAWATI HERI PRASTUTI, SE. MM**  
NIP. 19730501 199603 2 004

Sub Koordinator  
Bidang Pembangunan Manusia dan  
Pemerintahan



**EKO BUDI MULYANTO, SE. MM**  
NIP. 19681117 199003 1 002

Mengetahui  
**KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN TEMANGGUNG,**



**Ir. C. MASRIK AMIN ZUHDI, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611121 198703 1 006

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung telah menyelesaikan penyusunan/perencanaan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022, yang merupakan bentuk perencanaan program dan kegiatan selama jangka waktu 1 (satu) tahun.

Adapun tujuan disusunnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung tahun 2022 adalah sebagai panduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022.

Demikian Renja Kerja tahun 2022 ini kami susun semoga dapat menjadikan acuan dan sebagai peningkatan kinerja di tahun yang akan datang.

Temanggung, September 2021  
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG



**Drs. EDY CAHYADI, M.M**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730619 199303 1 003

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	7
1.3. Maksud dan Tujuan .....	9
1.4. Sistematika Penulisan .....	10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN TAHUN 2020 .....	12
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dan Capaian Renstra Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 .....	21
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung .....	30
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung .....	58
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD .....	59
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	
2.6. Inovasi Perangkat Daerah.....	
2.7. Penghargaan.....	

<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN</b>	
<b>KEGIATAN .....</b>	<b>68</b>
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	68
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PP dan	
Pemadam Kebakaran dan Pemadam	
Kebakaran .....	73
3.3. Program dan Kegiatan .....	75
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>80</b>

### DAFTAR TABEL

Tabel 2.2	Cakupan Penegakan Perda dan Perbup Kabupaten Temanggung, Tahun 2015-2019	24
Tabel 2.3	Tabel Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup Tahun 2019	25
Tabel 2.4	Tabel Rasio Petugas Satpol PP Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2019	26
Tabel 2.5	Tabel Data pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung Tahun 2019	27
Tabel 2.6	Tabel Rasio Linmas per RT Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2019	31
Tabel 2.7	Tabel sebaran anggota Linmas per kecamatan se-Kabupaten Temanggung Tahun 2019	31
Tabel 2.8	Tabel Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2019	35
Tabel 2.9	Tabel Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Kabupaten Temanggung, Tahun 2015-2019	36
Tabel 2.10	Tabel Data Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2019	37
Tabel 2.11	Tingkat penyelesaian pelanggaran K4 Kabupaten Temanggung, Tahun 2015-2019	39
Tabel 2.12	Tabel Data Pelanggaran Perda K4 per kecamatan	40
Tabel 2.13	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2019	41
Tabel 2.14	Tabel Jumlah Patroli Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Tahun 2019	42
Tabel 2.15	Prosentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi Kabupaten Temanggung, Tahun 2015-2019	45
Tabel 2.16	Daftar Personil Seksi Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2019	46
Tabel 2.17	Rasio Mobil Pemadam Kebakaran di atas 3.000-5.000 liter Pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Temanggung, Tahun 2015-2019	48
Tabel 2.18	Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran Tahun 2019	49
Tabel 2.19	Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi yang dilaksanakan oleh Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung, Tahun 2019	50
	Tabel daftar penyelamatan dan evakuasi pada	52

Tabel 2.20	kondisi membahayakan manusia (operasi darurat nonkebakaran) oleh Pemadam Kebakaran	
Tabel 2.21	Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung	55
Tabel 2.22	Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2021	60
Tabel 2.23	Usulan-Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	67
Tabel 3.1	Matrik Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung	74
Tabel 3.2	Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Temanggung Tahun 2021	75

## **PBAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

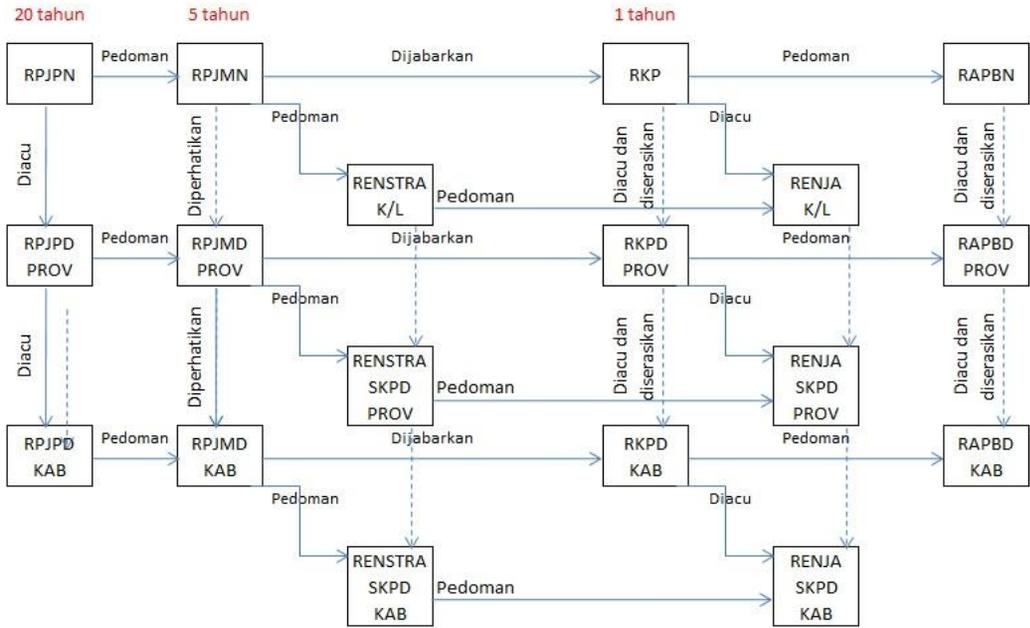
Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah dokumen

perencanaan Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2022 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2022.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1  
**Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan**

Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2022 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

**a. Pengolahan data dan informasi;**

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan

pelayanan internal Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran , yang menyangkut aspek :

- 1) Kondisi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2022;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ; dan
- 12) Informasi lainterkait pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran .

**b. Analisis gambaran pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ;**

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- 2) Mengidentifikasivariabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2010, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;

- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

**c. *Mereview* hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun lalu berdasarkan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;**

*Review* hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

*Mereview* faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

*Review* capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauhmana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sampai dengan tahun berjalan,

misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

**d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;**

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

**e. Telaah terhadap rancangan awal RKPD;**

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap

program atau kegiatan untuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

**f. Perumusan tujuan dan sasaran;**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

**g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;**

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Namun dalam proses ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

**h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;**

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting

terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam pembangunan daerah.

**i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;**

Penyusunan dokumen rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

**j. Telaahan Kebijakan Nasional;**

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

**k. Penyempurnaan rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;**

Penyempurnaan rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

**l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan**

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

**m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.**

Dokumen rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

## 1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022 adalah sebagai pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2022;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADM KEBAKARAN TAHUN 2020

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

**BAB II****EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN TAHUN 2020****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2020 dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2020 terhadap capaian renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2022.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran  
s.d Tahun 2020

No	Bidang/ Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp (%)	K	Rp.	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	18	19
<b>Belanja Tidak Langsung</b>																			
1	Belanja Pegawai																		
a.	Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan	bulan	70	-	14	4.375.780.038	14	4.769.855.007	4.769.855.007	14	4.694.819.504	100	98,43	28	9.070.599.542			
	Total Program						4.375.780.038		4.769.855.007	4.769.855.007		4.694.819.504				9.070.599.542			
<b>Belanja Langsung</b>																			
<b>A</b>	<b>URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>																		
<b>1</b>	<b>Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>																		
a.	Penegakan Perda dan Yustisi	Terlaksananya penegakan perda, yustisi dan penertiban pedagang kaki lima	bulan	60	172.349.000	12	59.142.400	12	25.000.000	18.732.980	12	18.721.980	100	99,94	24	77.864.380	40,00	45,18	
b.	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Terbayarnya gaji tenaga bantu Satpol PP sejumlah 30 personil.	bulan	60	3.999.860.500	12	745.392.100	12	725.000.000	693.314.000	12	690.134.136	100	99,54	24	1.435.526.236	40,00	35,89	
c.	Pengamanan dan Pengawasan	Terselenggaranya pengamanan dan pengawasan protokol	kecamatan	100	91.808.000	20	21.435.300	20	15.000.000	5.013.000	20	5.013.000	100	100	40	26.448.300	40,00	28,80	

d.	Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)	Terlaksananya pemberantasan barang kena cukai ilegal	kecamatan	105	750.000.000	20	92.861.000	20	125.000.000	63.285.000	20	57.225.300	100	90,42	40	150.076.300	40,00	20,01	
e.	Pengembangan Korps Musik Praja Sangkakala Kabupaten Temanggung	Terlaksananya pelaksanaan upacara kenegaraan yang khidmat	kegiatan	150	219.850.000	7	67.277.500	10	70.000.000	27.407.000	10	27.073.000	100	98,78	17	94.350.000	11,33	42,92	
Total Program					<b>5.233.867.500</b>		<b>986.108.300</b>		<b>960.000.000</b>	<b>807.751.980</b>		<b>798.167.416</b>				<b>1.649.265.216</b>			
<b>2 Program peningkatan perlindungan masyarakat</b>																			
a.	Pembinaan Satuan Linmas	Terbinanya Satlinmas di tiap desa/kelurahan dan terlaksananya diklat untuk anggota Linmas	Desa/kel.	1.445	440.590.000	289	97.207.100	289	125.000.000	45.870.000	289	32.863.000	100	71,64	578	130.070.100	40,00	29,52	
b.	Cipta kondisi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya pengamanan Pilkadaes serentak	Desa	252	1.066.000.000	200	253.669.000	200	950.000.000	662.528.000	216	662.528.000	100	100	416	916.187.000	100	85,95	
Total Program					<b>1.506.590.000</b>		<b>350.876.100</b>		<b>1.075.000.000</b>	<b>708.398.000</b>		<b>695.391.000</b>				<b>1.091.257.100</b>			
<b>2. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran</b>																			
a.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran sejumlah 13 mobil pemadam kebakaran beserta	bulan	60	1.160.386.500	12	279.192.352	12	195.000.000	212.172.000	12	208.987.019	100	98,50	24	488.179.371	40,00	42,07	

b.	Kesiap Siagaan Penanganan Kebakaran	perengkapannya Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat dan tewujudnya masyarakat yang tanggap bahaya kebakaran	bulan	60	4.666.120.800	12	926.390.446	14	935.000.000	932.344.000	14	927.857.927	100	99,52	28	1.854.248.373	43,33	39,75	
	Total Program				<b>5.826.507.300</b>		<b>1.205.582.798</b>		<b>1.130.000.000</b>	<b>1.144.516.000</b>		<b>1.136.844.946</b>				<b>2.342.427.744</b>			
3.	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah																		
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Terlaksananya penyusunan dan pelaporan dokumen OPD	dokumen	135	19.886.000	100	3.360.300	33	5.000.000	960.000	33	960.000	100	100	133	4.320.300	98,52	21,73	
	Total Program				<b>19.886.000</b>		<b>3.360.300</b>		<b>5.000.000</b>	<b>960.000</b>		<b>960.000</b>				<b>4.320.300</b>			
4.	Program pelayanan administrasi perkantoran																		
a.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa telekomunikasi, sumber daya air, listrik, internet	bulan	60	278.200.000	12	48.088.134	12	50.000.000	64.998.396	12	57.566.247	100	88,57	24	105.654.381	40,00	37,98	
b.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	bulan	60	331.000.000	12	79.312.927	12	62.000.000	64.719.400	12	63.749.918	100	98,50	24	143.061.845	40,00	43,22	
c.	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	bulan	60	28.000.000	12	6.821.100	12	5.000.000	7.000.000	12	6.989.000	100	99,84	24	12.610.100	40,00	45,04	
d.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	bulan	60	62.619.000	12	5.019.500	12	4.000.000	4.296.000	12	3.945.800	100	91,85	24	8.965.300	40,00	14,32	

e.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi kantor	bulan	60	48.600.000	12	17.114.500	1 2	7.000.000	6.749.950	12	6.744.350	100	99,92	24	23.858.850	40,0 0	49,19
f.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	60	7.000.000	12	1.200.000	1 2	1.500.000	660.000	12	660.000	100	100	24	1.860.000	40,0 0	26,57
g.	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat, tamu, dan harian pegawai	bulan	60	210.000.000	12	48.315.000	1 2	45.000.000	46.240.000	12	41.810.000	100	90,40	24	90.125.000	40,0 0	42,92
h.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	Bulan	60	280.000.000	12	58.810.000	1 2	55.000.000	48.510.000	12	48.452.262	100	99,88	24	107.262.262	40,0 0	38,31
i.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	bulan	60	19.999.000	12	4.710.000	1 2	3.000.000	150.000	12	130.000	100	86,67	24	4.840.000	40,0 0	25,47
j.	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Tersedianya pembayaran uang lembur PNS dan belanja jasa transaksi keuangan	bulan	60	60.000.000	12	12.248.475	1 2	10.000.000	4.461.000	12	4.059.500	100	91,00	24	16.307.975	40,0 0	27,18
k.	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	Tersedianya penjaga malam	Bulan	60	400.000.000	12	80.000.000	1 2	80.000.000	84.960.000	12	84.077.742	100	98,96	24	164.077,742	40,0 0	41,02
	Total Program				<b>1.725.418.000</b>		<b>361.639.636</b>		<b>322.500.000</b>	<b>332.744.746</b>		<b>318.184.819</b>				<b>678.623.455</b>		
5.	Program peningkatan sarana prasarana aparatur																	
a.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis barang	12	40.950.000	2	4.620.000	2	5.000.000	4.950.000	2	4.950.000	100	100	4	9.570.000	33,3 3	23,37

b.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor	Jenis barang	21	71.000.000	3	9.995.000	4	10.000.000	10.000.000	4	10.000.000	100	100	7	19.995.000	33,33	28,16	
c.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya servis, pembelian suku cadang, pembelian BBM, pembayaran STNK	bulan	60	750.000.000	12	142.839.689	12	125.000.000	105.515.500	12	103.545.536	100	98,13	24	246.386.226	40,00	32,85	
d.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	bulan	60	31.900.000	12	1.755.000	12	5.000.000	3.000.000	12	3.000.000	100	100	24	4.755.000	40,00	14,91	
e.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	bulan	60	26.500.000	12	4.925.000	12	5.000.000	3.104.000	12	3.104.000	100	100	24	8.029.000	40,00	30,30	
f.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Unit gedung	6	176.000.000	1	49.981.600	1	40.000.000	37.866.700	1	37.813.000.	100	99,66	2	87.294.600	40,00	49,88	
	Total Program				<b>1.096.350.000</b>		<b>214.116.289</b>		<b>190.000.000</b>	<b>164.436.200</b>		<b>162.412.536</b>				<b>376.029.826</b>			
6.	Program peningkatan disiplin aparatur																		
a.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	stel	164	308.500.000	0	0	90	56.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b.	Pembinaan dan pengembangan Satpol PP	Meningkatnya disiplin dan kualitas Satpol PP	orang	553	230.957.000	12	66.119.000	127	30.000.000	4.750.000	127	4.750.000	100	100	130	69.869.000	21,34	30,25	
	Total Program				<b>539.457.000</b>		<b>66.119.000</b>		<b>30.056.500</b>	<b>4.750.000</b>		<b>4.750.000</b>				<b>69.869.000</b>			

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2020 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
  - a. Pengamanan dan Pengawalan;
  - b. Cipta kondisi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
  - c. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan;
  - d. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
  - e. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
  - f. Pengadaan peralatan gedung kantor;
  - g. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
  - h. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
  - i. Pembinaan dan pengembangan Satpol PP;
2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada.
3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
  - a. Penegakan Perda dan Yustisi;
  - b. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
  - c. Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT);
  - d. Pengembangan Korps Musik Praja Sangkakala Kabupaten Temanggung;
  - e. Pembinaan Satuan Linmas;
  - f. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran;
  - g. Kesiap Siagaan Penanganan Kebakaran;
  - h. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

- i. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- j. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- k. Penyediaan barang cetakan dan;
- l. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- m. Penyediaan makanan dan minuman;
- n. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
- o. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;
- p. Penyediaan jasa pelayanan perkantoran;
- q. Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor;
- r. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
- s. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor;
- t. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2020, maka dapat dikatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Baik** yaitu dengan nilai **98,98%,(d disesuaikan hasil masing-masing PD)**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah;  
Capaian Kinerja : 98,31 % kategori Baik
2. Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah; dan  
Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Sangat Baik
3. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.  
Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Sangat Baik

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2020 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**

### **2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)**

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat dilihat pada Tabel 2.2 Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.2  
 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran  
 Kabupaten Temanggung s/d Tahun 2020

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2020 (%)	Status
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Indek Rasa Aman	%	0,63	0,64	0,65	0,66	0,67	4,23	4,36	-	-	-	100	TT
2	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Angka	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	TT
3	Rasio Petugas Satpol PP	Rasio	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,33	1,09	-	-	-	92,37	AT
4	Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	1,48	1,62	1,62	1,62	1,62	1,38	1,38	-	-	-	85,39	AT
5	Cakupan Penanganan Bencana Kebakaran Kabupaten	%	60,64	60,64	60,64	60,81	61,00	60,64	60,64	-	-	-	99,42	AT
6	Tingkat Waktu Tanggap(Response Time Rate)	%	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	42,86	55,56	-	-	-	79,59	AT
7	Persentase Aparatur yang Memenuhi Standar Kualifikasi	%	40	41	42	43	44	33,96	35,19	-	-	-	79,97	AT

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 2 (dua) terdiri dari:
  - a. Indek Rasa Aman.
    - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah SDM Kabupaten Temanggung yang tidak menyukai konflik, kondisi geografis sebagai sebuah wilayah administratif di pegunungan yang kecil.
    - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Dinamika kota kecil di pegunungan menjadi salah satu destinasi persembunyian yang aman bagi para teroris.
    - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah diberikan pelatihan teknis dan alokasi anggaran anggaran penghitungan dari UP5AD kepada OPD.
  - b. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
    - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah SDM Satpol PP yang melaksanakan Penegakan Perda dengan pendekatan non yustisial yang humanis dan persuasive.
    - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Belum berfungsinya PPNS (PPNS baru diberangkatkan diklat).
    - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah secara rutin melaksanakan sosialisasi dan mengintensifkan patrol dan mengikutsertakan personil untuk mengikuti diklat atau bimbingan teknis.
2. Capaian indikator dengan status akan tercapai ada 5 (lima) terdiri dari:
  - a. Rasio Petugas Satpol PP.
    - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah memaksimalkan SDM Satpol PP dan Damkar yang ada.
    - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah SDM Satpol PP Damkar banyak yang dimutasi ke OPD lain.
    - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi

/OPD lain dalam hal penegakan Perda/Perbup.

- b. Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat
  - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah jumlah Linmas yang ada sudah sangat memadai.
  - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah persebaran Linmas di tiap desa/kelurahan tidak merata.
  - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah mengadakan pembinaan linmas ke desa/kelurahan.
- c. Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten
  - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah jumlah Linmas yang ada sudah sangat memadai.
  - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Persebaran Linmas di tiap desa/kelurahan tidak merata.
  - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah peningkatan sarana dan prasarana dan peningkatan kompetensi pegawai serta pemberdayaan masyarakat.
- d. Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)
  - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah informasi yang diterima tidak terlambat, lokasi mudah dijangkau, ketersediaan sumber air mudah didapatkan.
  - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah TKP merupakan medan yang sulit dijangkau, informasi/laporan kejadian kebakaran terlambat, sumber air tidak mudah dijangkau/sulit atau bahkan tidak ada keberadaannya.
  - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah memberikan sosialisasi kepada warga agar cepat memberikan laporan bila terjadi kebakaran.
- e. Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi
  - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya alokasi anggaran diklat/bintek yang tersedia di BKPSDM
  - 2) Penyedia/instansi yang menyelenggarakan diklat sangat terbatas.
  - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah mengikuti kegiatan – kegiatan yang bersifat pengembangan kapasitas aparatur pemadam kebakaran

(baik pelatihan maupun lomba).

3. Capaian indikator dengan status upaya keras : Tidak ada

### **2.2.2. Data Pokok**

Data Pokok pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terdiri dari 2 jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Data Pokok Bidang Pemadaman Kebakaran, dengan rincian sebagai berikut:

#### **2. Data Pokok Bidang Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.**

##### **a. Indeks Rasa Aman**

Definisi “Rasa Aman” berdasarkan UU No 9 Tahun 1999 pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa rasa aman merupakan suatu hak yang diterima secara pribadi oleh manusia atas rasa aman dan tenang serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Implementasi dari Indikator Rasa Aman dalam kajian ini adalah untuk mengukur rasa aman yang dirasakan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.

Ada empat komponen yang terdapat dalam Indikator Rasa Aman, antara lain:

- 1) Keamanan dari Bencana;
- 2) Pemenuhan Kesejahteraan Sosial;
- 3) Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan,
- 4) Keamanan dari Kekerasan.

Indeks Rasa Aman merupakan salah satu variabel dalam Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas), sebagai variabel yang menyatakan perasaan masyarakat terhadap rasa aman di daerahnya. Indeks Rasa Aman terdiri dari 4 indikator yakni kesadaran hukum, organisasi sipil, mitigasi resiko sosial dan penyelesaian sengketa secara beradab.

Untuk memperoleh angka indeks rasa aman, didapatkan dari survey indeks pembangunan masyarakat berdasarkan survey dari Tim P5 Universitas Diponegoro Semarang.

Realisasi indeks rasa aman di Kabupaten Temanggung diperoleh berdasarkan survey dari Tim P5 Universitas Diponegoro Semarang tahun 2020 adalah 4,23 (skala 1-5) dengan kategori sangat baik. Realisasi Indeks Rasa Aman tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3  
Indeks Rasa Aman dari Tahun 2016-2020

Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Rasa Aman	Angka	n.a	n.a	n.a	4,23	4,36

*sumber data : P5 Universitas Diponegoro Tahun 2020*

Pada tahun, 2016, 2017, 2018 belum dilaksanakan perhitungan Indeks Rasa Aman, di tahun 2019 dan tahun 2020 baru dilaksanakan perhitungan Indeks Rasa Aman dari Tim P5 Universitas Diponegoro Semarang.

#### **b. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah melakukan penegakan peraturan daerah, yang selanjutnya disebut perda dan peraturan kepala daerah.

Pada prinsipnya penegakan perda dan peraturan kepala daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk menjamin dan memastikan perda dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Apabila terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah, satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menyelesaikannya.

Cakupan penegakan perda dan peraturan kepala daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyelesaikan setiap terjadi

pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran perda yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

Penyelesaian pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah oleh satuan polisi pamong praja dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur satuan polisi pamong praja yaitu tindakan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Apabila pelanggaran terhadap perda mengandung unsur pidana dan daerah tersebut telah memiliki PPNS, Satuan Polisi Pamong Praja dapat meneruskan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Rumus Cakupan penegakan perda dan/atau perbup adalah Jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan bupati yang diselesaikan di tahun bersangkutan dibagi Jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan bupati yang dilaporkan dan/atau dipantau di tahun bersangkutan dikali 100%.

Cakupan penegakan perda dan perbup pada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4  
Cakupan Penegakan Perda dan Perbup  
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020 TW IV

Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Pelanggaran Perda/Perbup yang ditangani	kasus	638	797	275	462	1903
Pelanggaran Perda/Perbup yang dilaporkan atau dipantau	kasus	638	797	315	462	1903
Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	%	100	100	87,3	100	100

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Tw IV

Dari tabel yang disajikan di atas dapat dilihat bahwa pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati tahun 2018 mengalami penurunan dikarenakan di tahun 2018 penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati baru mencakup perda K4 dan Perda PGOT, dan penanganan terhadap pelanggaran perda dan perbup penyelesaiannya hanya sebatas sosialisasi, pendataan dan pembinaan kepada pelanggar Perda dan Perbup (preventif non yustisial).

Tahun 2020 TW IV pelanggaran Peraturan Daerah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2020 sampai dengan TW IV volume kegiatan penegakan Perda K4 bertambah, sehingga di lapangan banyak ditemukan pelanggaran Perda K4 dimana terdapat pemasangan spanduk, banner dan baliho yang melanggar Peraturan daerah. Selain itu meningkatnya jumlah PGOT (anak punk) yang ada atau singgah di Kabupaten Temanggung semakin bertambah banyak dan disinyalir PGOT tersebut kiriman dari luar Kabupaten, juga di awal tahun 2020 adalah tahun politis pemilihan Kepala Desa sehingga banyak didapati spanduk dari Tim Sukses Pemilihan Kepala Desa yang melanggar Perda K4. Selain dari Perda K4, Perda PGOT dan Perda PKL di tahun 2020 ada penambahan Perbub Nomor 45 tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan pencegahan covid 19. Penegakan Perbub Nomor 45 tahun 2020 meliputi operasi/yustisi pemakaian masker, penerapan protokol Kesehatan ditempat wisata, pasar dan tempat keramaian yang tersebar di 20 Kecamatan se-Kabupaten Temanggung.

Adapun pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati pada tahun 2020 TW IV dapat tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.5

Tabel Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup  
Sampai dengan Triwulan IV  
Tahun 2020

No.	Jenis Pelanggaran Perda	Perda / Perbup	Lokasi Kegiatan	Jumlah
1	K4	No. 12 tahun 2011	20	931
2	PGOT	No. 3 tahun 2013	kecamatan di Kabupaten Temanggung	68
3	IMB	No. 15 tahun 2011		5
4	Minuman Beralkohol	No. 5 tahun 2015		15
5.	Reklame	No. 33 tahun 2011		11
6.	PKL	No. 3 tahun 2019		73
7.	Protokol Kesehatan	No. 45 tahun 2020 ( Perbup )		800
<b>JUMLAH</b>				<b>1.903</b>

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Tw IV

Jenis Pelanggaran dimaksud sesuai dengan hasil giat operasi di lapangan terkait dengan perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kebersihan, keindahan, ketertiban dan Kesehatan Lingkungan, Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar dan Tuna Susila (PGOT), Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang IMB dan Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Minuman Beralkohol, Perda Nomor 33 Tahun 2011 tentang Reklame serta penambahan penegakan Peraturan Daerah No. 3 tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Penegakan Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan pencegahan virus Covid 19.

### c. Rasio Petugas Satpol PP

Menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan beberapa indikator penghitungan jumlah Polisi Pamong Praja. Kriteria umum meliputi: jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD dan rasio belanja aparatur. Sedangkan kriteria teknis meliputi: klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah, jumlah peraturan daerah, jumlah peraturan kepala daerah, jumlah desa/kelurahan, tingkat potensi konflik sosial

kemasyarakatan, jumlah kecamatan, aspek karakteristik dan kondisi geografis.

Rumus untuk memperoleh angka rasio petugas satpol pp adalah jumlah anggota Satpol PP dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.

Rasio petugas Satpol PP tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.6**  
**Rasio Petugas Satpol PP Kabupaten Temanggung,**  
**Tahun 2016-Tahun 2020 TW IV**

Uraian	satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk	Orang	768.290	772.289	780.148	791.264	791.264
Jumlah anggota Satpol PP	Orang	121	92	114	104	86
Rasio Petugas Satpol PP	Orang	1,5	1,1	1,4	(1,33)	1,08
Jumlah Minimal	Orang	150	150	150	150	150
Kekurangan	Orang	29	58	36	43	64

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Tw IV

Menurut analisa penghitungan dan penetapan jumlah Pol PP dari kriteria tersebut, jumlah Satpol PP di Kabupaten Temanggung seharusnya sebanyak 150 sampai dengan 250 pegawai, sedangkan jumlah Pol PP yang ada di Kabupaten Temanggung baru tersedia sejumlah 86 personil (menurun dikarenakan ada mutasi pegawai dan ada pegawai yg pensiunakan tetapi dari jumlah itu masih terdapat kekurangan minimal sejumlah 64 personil, akan tetapi dengan jumlah personil yang ada sudah dapat melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Fluktuasi pada tahun-tahun sebelumnya dikarenakan adanya penarikan Satpol PP yang bertugas mengamankan asset daerah digantikan oleh Satpam, mutasi pegawai, pension maupun Satpol PP yang meninggal dunia.

Tabel 2.7  
**DATA PEGAWAI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**TAHUN 2020**

NO	NAMA	NIP	JABATAN	PANGKAT	GOL/ RUANG
1	AGUS MUNADI, S.Sos.M.Si	19611110 198503 1 018	Kasatpol PP	Pembina Utama Muda	IV/c
2	SUBKHAN ASHADI, S.Sos, M.Si	19700426 199003 1 001	Sekretaris	Pembina Tk. I	IV/b
3	YUNI WULANSARI, S. Sos, M.M.	19800627 200312 2 003	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Pembina	IV/a
4	MILA SETIYAMINA HARSONO, SSTP, M.M	19820407 200012 2 001	Kabid Tramtibum	Penata Tk. I	III/d
5	WALNGADI, S.Sos	19630205 199303 1 005	Kabid Linmas dan Damkar	Penata Tk. I	III/d
6	SUSILO	19630820 198607 1 002	Kasi Tibum	Penata Tk. I	III/d
7	HARTOYO, S.Sos	19630327 198803 1 012	Kasi Linmas	Penata Tk. I	III/d
8	MUH. AKBAR, S.Sos, M.Si	19710217 199403 1 006	Kasi Gakda	Penata Tk. I	III/d
9	FIVIEN BUDI ASTUTI, SH	19660409 200801 2 005	Kasubbag Umpeg	Penata Tk. I	III/d
10	RAMA ADITYA CAHYA, SIP, MAP	19870303 2007011 002	Kasi Damkar	Penata	III/c
11	AGUS SUGIARTO	19640803 198602 1 003	Pranata Tata Praja	Penata Muda Tk. I	III/b
12	JOKO SANTOSA, SE	19730814 201001 1 003	Bendahara	Penata Muda	III/a
13	M. FAKHRUDIN, S.AP	19810212 200901 1 002	Pengelola keamanan dan ketertiban	Penata Muda	III/a
14	ARI RISBIYANTO, SE	19810514 201001 1 007	Verifikator Keuangan	Penata Muda	III/a
15	JOKO NURSUSILO, S.AP	19810723 201001 1 001	Penyidik	Penata Muda	III/a
16	SUSILO HANDAYANI, S.AP	19810807 201001 1 005	Pengelola Data	Penata Muda	III/a
17	WARISO SUGIYARTO, S.AP	19820728 201001 1002	Pengelola Kepegawaian	Penata Muda	III/a
18	NUR SOLEH, S.AP	19830305 201001 1 004	Pengolah Data Penindakan dan Sarana Operasi	Penata Muda	III/a

19	HERI KURNIAWAN, S.AP	19830720 201001 1 004	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Penata Muda	III/a
20	DWI SETYORINI, S.AP	19840305 201001 2 002	Pengolah Data Penindakan dan Sarana Operasi	Penata Muda	III/a
21	ELIYA, S.AP	19840419 201001 2 004	Pengolah Data penindakan dan Sarana Operasi	Penata Muda	III/a
22	FRANSISKA DIAN MAYASARI, S.AP	19850518 201001 2 003	Pengelola Data	Penata Muda	III/a
23	M U S T O F A	19640804 200604 1 005	Pranata Tata Praja	Pengatur Tk. I	II/d
24	RAKHMANTO	19650402 200701 1 023	Pranata Tata Praja	Pengatur Tk. I	II/d
25	DWI SUGENG	19700827 200604 1 004	Pranata Tata Praja	Pengatur	II/c
26	HERY WIDIYANTO	19801208 200901 1 005	Pranata Tata Praja	Pengatur	II/c
27	MIFTACHUROHMAN	19801218 200901 1 001	Pranata Tata Praja	Pengatur	II/c
28	MUH. KHOERUN	19810315 200901 1 001	Pranata Tata Praja	Pengatur	II/c
29	TRI HANDOYO	19811029 201001 1 002	Pranata Tata Praja	Pengatur	II/c
30	NUR ZUBAIDI	19811219 201001 1 002	Pranata Tata Praja	Pengatur	II/c
31	MARJOKO	19820102 201001 1 003	Pranata Tata Praja	Pengatur	II/c
32	AFANDI	19820303 201001 1 003	Pranata Tata Praja	Pengatur	II/c
33	IMAM SUPRIYANTO	19820425 201001 1 002	Pranata Tata Praja	Pengatur	II/c
34	MENIK DWI SETIYANTI	19830504 201001 2 003	Pranata Tata Praja	Pengatur	II/c
35	EKA BUDI HARIYADI	19830525 201001 1 004	Pranata Tata Praja	Pengatur	II/c
36	M. ABROR	19830601 201001 1 004	Pranata Tata Praja	Pengatur	II/c
37	EKO MAHANTORO	19840829 201001 1 002	Pranata Tata Praja	Pengatur	II/c
38	A M I R	19640223 200604 1 002	Pranata Tata Praja	Pengatur Muda Tk. I	II/b
<b>I</b>	<b>KECAMATAN TEMANGGUNG</b>				
<b>II</b>	<b>KECAMATAN KRANGGAN</b>				
<b>III</b>	<b>KECAMATAN PRINGSURAT</b>				
39	SUHARMAN	19811127 201001 1 001	Staf	Pengatur	II/c
<b>IV</b>	<b>KECAMATAN TEMBARAK</b>				
<b>V</b>	<b>KECAMATAN TLOGOMULYO</b>				
<b>VI</b>	<b>KECAMATAN SELOPAMPANG</b>				
40	MUJI ARUM	19740830 200901 1 004	Staf	Juru Muda	I/a
41	MUHAMAD SUNHAJI	19641230 200701 1 007	Staf	Pengatur	II/c
<b>VII</b>	<b>KECAMATAN KEDU</b>				

42	WINARKO	19800818 200901 1 003	Staf	Pengatur	II/c
<b>VIII</b>	<b>KECAMATAN BULU</b>				
<b>IX</b>	<b>KECAMATAN PARAKAN</b>				
43	CHAMIDI	19640512 198903 1 017	Staf	Penata Muda	III/a
44	SUKISNA	19660220 201001 1 002	Staf	Juru Muda	I/c
45	MUHAMAD LUTFI	19690810 198903 1 009	Staf	Penata Muda Tk. I	III/b
<b>X</b>	<b>KECAMATAN KLEDUNG</b>				
46	TAAT SUPRIYONO	19820406 201001 1 003	Staf	Pengatur	II/c
<b>XI</b>	<b>KECAMATAN BANSARI</b>				
47	SUGENG HARIYADI	19711122 199203 1 004	Staf	Penata Muda Tk. I	III/b
48	AGUS MARTONO	19700828 200604 1 008	Staf	Pengatur Muda Tk. I	II/b
<b>XII</b>	<b>KECAMATAN NGADIREJO</b>				
49	PARIYANTO	19801229 200901 1 002	Staf	Pengatur	II/c
50	SUWARDI	19681225 199303 1 006	Staf	Penata Muda Tk. I	III/b
<b>XIII</b>	<b>KECAMATAN CANDIROTO</b>				
51	ROCHYANTO	19640206 198610 1 002	Staf	Penata Muda	III/a
52	A. DAWUD	19700605 200701 1 035	Staf	Juru	I/c
<b>XIV</b>	<b>KECAMATAN WONOBOYO</b>				
53	SETIYARTO	19630607 199403 1 005		Pengatur	II/c
54	JOKO IRWANTO			Juru	I/c
<b>XV</b>	<b>KECAMATAN TRETEP</b>				
<b>XVI</b>	<b>KECAMATAN BEJEN</b>				
55	SUBIYARTONO	19630824 198603 1 010	Staf	Penata Muda	III/a
<b>XVII</b>	<b>KECAMATAN JUMO</b>				
<b>XVIII</b>	<b>KECAMATAN GEMAWANG</b>				
56	TRI SUMBOGO	19671127 198811 1 001	Staf	Penata Muda	III/a
<b>XIX</b>	<b>KECAMATAN KANDANGAN</b>				
<b>XX</b>	<b>KECAMATAN KALORAN</b>				
	<b>TENAGA BANTU POL PP 2018</b>				
57	AGUNG SANTOSA				
58	ALDO MAULANA PUTRA				

59	ANDREAS PUTRA AJI SETIAWAN				
60	ARDIAN BAGAS PRATAMA				
61	AZIZ SOLICHUDIN				
62	BAYU NUGROHO				
63	CHOIRUL MUBAROK				
64	ERLINA RISKI ASTITI				
65	FASA WIDI KURNIAWAN				
66	GHUFRON AFFISINA				
67	IWAN WIDODO				
68	LAILIA NUR FARIDA				
69	LINDA ZARZA ARLITA				
70	MUHAMMAD SALAFUDIN				
71	MUKHAMAD ABDUL BASIT				
72	MUHAMMAD JA'VAR SODIK				
73	NAZARUDIN ULYA				
74	NURVITA OCTIANA				
75	OKTA DWI NUGROHO				
76	OKTA MARY BAGUS HARJANTO				
77	PAMUNGKAS MEILISA PUSPITASARI				
78	RATNA MAUDY INDRAWASNO				
79	RIZKI NUR FAEDAH				
80	RIZKY YANASARI				
81	ROHMAT AHYAKUL KARIM				
82	ROSSI DEWI RIANA				
83	THUBAGUS NUR MA'ARIF				
84	WAHYU AHMAD FAUZI				
85	WILDAN MAULANA BAEDHOWI				
86	YULIYANA				

*Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Tw IV*

Di Kecamatan Temanggung, Kecamatan Tretep, Kecamatan Tembarak, Kecamatan Kandangan, Kecamatan Tlogomulyo, Kecamatan Bulu, Kecamatan Kaloran, Kecamatan Jumo, dan Kecamatan Kranggan tidak terdapat Satpol PP dikarenakan

petugas Satpol PP melimpah menjadi staf kecamatan dan beberapa personil yang telah purna tugas.

### c. Rasio Linmas per RT

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota, Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat secara luas. Rasio jumlah Linmas di Kabupaten/Kota adalah jumlah satuan perlindungan masyarakat pada tingkat RT atau sebutan lainnya yang tugasnya membantu pelayanan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut membantu memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan, menggambarkan kapasitas partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat guna terciptanya kondisi lingkungan yang kondusif.

Untuk memperoleh angka rasio linmas dapat digunakan rumus Rasio jumlah satuan linmas per RT atau sebutan lainnya adalah jumlah satuan linmas dalam satu kabupaten/kota dibagi jumlah RT atau sebutan lainnya dalam satu kabupaten/kota. Rasio Linmas tahun 2015-2020 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.8  
Rasio Jumlah Linmas Per RT

Kabupaten Temanggung, Tahun 2015-s.d Tahun  
2020 TW IV

NO	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020 s/d TW IV
1.	Jumlah Linmas	8.797	9.158	8.172	8.184	8.184	8.184
2.	Jumlah RT	5.553	5.692	5.692	5.916	5.916	5.916

3.	Rasio	1,5	1,6	1,4	1,3	1,3	1,3
----	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Sumber data : laman.temanggungkab.go.id website resmi Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Dari tabel di atas tercantum bahwa rasio jumlah anggota Linmas per RT telah mencukupi akan tetapi sebaran anggota Linmas belum merata disebabkan karena tahun 2020 Triwulan II masih sama dengan tahun 2019 dimana jumlah Linmas tidak mengalami penambahan ataupun penurunan.

Namun dengan jumlah anggota Linmas yang ada telah dapat dikatakan Linmas Kabupaten Temanggung dapat melaksanakan tugas perlindungan masyarakat.

Jumlah anggota Linmas di Kabupaten Temanggung tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.9

Persebaran Anggota Linmas di Kecamatan-Kabupaten  
Temanggung Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah RT	Jumlah Linmas (orang)	Rasio
1.	Bulu	19	302	536	1,7
2.	Tembarak	13	224	359	1,6
3.	Temanggung	25	562	864	1,5
4.	Pringsurat	14	364	456	1,2
5.	Kaloran	14	416	349	0,8
6.	Kandangan	16	378	440	1,1
7.	Kedu	14	424	325	0,7
8.	Parakan	16	357	447	1,2
9.	Ngadirejo	20	426	470	1,1
10.	Jumo	13	273	375	1,3
11.	Tretep	11	141	261	1,8
12.	Candiroto	14	275	386	1,4
13.	Kranggan	13	382	367	0,9
14.	Tlogomulyo	12	156	383	2,4
15.	Selompampang	12	128	322	2,5
16.	Bansari	13	189	357	1,8
17.	Kledung	13	160	409	2,5
18.	Bejen	14	170	405	2,3
19.	Wonobojo	13	209	346	1,6
20.	Gemawang	10	312	312	1
<b>Jumlah</b>		<b>289</b>	<b>5.916</b>	<b>8.184</b>	<b>1,3</b>

*Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Tw IV*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah linmas di Kabupaten Temanggung dari rasio 1 : 1 ( satu RT : satu Linmas ), sudah mencukupi, namun penyebarannya yang kurang merata. Di Kecamatan Kaloran jumlah RT 416 sedangkan jumlah linmasnya 349 orang, sehingga ada kekurangan 67 linmas, di Kecamatan Kedu kekurangan 99 linmas, di Kecamatan Kranggan kekurangan 15 linmas. Akan tetapi di kecamatan yang lain jumlah linmasnya rata-rata lebih banyak dr jumlah RT.

## **2. Data Pokok Bidang Pemadaman Kebakaran**

### **a. Cakupan Penanganan Bencana Kebakaran Kabupaten**

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 69 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 262 tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal bidang pemerintahan dalam negeri di Kabupaten/Kota, bencana kebakaran adalah setiap peristiwa bencana yang disebabkan karena kebakaran dan dapat menimbulkan kerugian materiil maupun korban jiwa, gangguan kesehatan dan lingkungan.

Cakupan pelayanan bencana kebakaran mencerminkan berapa persen luas lingkungan dan/atau wilayah potensi kebakaran dan rentan kebakaran yang mendapat WMK untuk mendapat layanan proteksi ancaman bencana kebakaran, maka cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota dijabarkan sebagai berikut:

- a. WMK dibentuk pada pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan.
- b. WMK perlu dilengkapi dengan mitigasi, sistem peringatan dini dapat melalui alarm dan sejenisnya, pemberitahuan kebakaran yang terintegrasi dalam WMK, kesiapsiagaan,

pos pelayanan pemadam kebakaran, sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

- c. WMK ditentukan oleh tingkat waktu tanggap (*response time*) dari pos pelayanan pemadam kebakaran terdekat yang memiliki satuan petugas pemadam kebakaran yang terlatih bersertifikasi, memiliki mobil pemadam kebakaran dan/atau peralatan penyemprotan pemadam api yang terintegrasi dengan ketersediaan sumber air dan/atau penyemprotan racun api dan alat pendukung pemadam api sesuai dengan tipologi kebakaran.

Daerah layanan WMK ditentukan oleh tingkat waktu tanggap, tingkat waktu tanggap pada permukiman, bangunan gedung publik, pabrik/industri tidak lebih dari 15 (lima belas) menit dan tingkat waktu tanggap pada kawasan hutan dan kebakaran tertentu tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit, satuan petugas pemadam kebakaran lengkap unit mobil atau mesin pompa air pemadam kebakaran atau sarana dan prasana pemadam lainnya telah tiba di tempat kejadian kebakaran yang langsung melakukan penyemprotan air dan/atau bahan pemadam api lainnya, pertolongan penyelamatan jiwa dan keselamatan harta benda.

Berdasarkan ketentuan ini, kepala daerah menetapkan bahwa setiap lingkungan dan/atau kawasan yang berpotensi ancaman kebakaran diwajibkan membentuk WMK dengan berdasarkan rencana induk sistim proteksi kebakaran dengan tujuan pengurangan resiko kebakaran dengan luas disesuaikan dengan kondisi dan jenis potensi atau tipologi kebakaran serta menyusun rencana induk sistem proteksi kebakaran dengan tujuan antara lain Pengurangan resiko kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi korban.

Dengan penambahan pos layanan pemadam dapat memangkas waktu tanggap darurat (*response time rate*). Suatu lingkungan dan/atau kawasan yang tidak membentuk WMK dikategorikan sebagai daerah tidak terlindungi (*unprotected area*). Pemerintah kabupaten/ kota dalam membentuk suatu kawasan WMK harus menyediakan:

- a. Pos Pelayanan Pemadam Kebakaran beserta garasi untuk mobil pemadam dan letak Pos Pemadam berada di tengah suatu kawasan WMK;
- b. Mobil Pemadam meliputi 1 unit truk pemadam kebakaran, 1 unit truk tanki air/ *water supply* dan 1 unit mobil *rescue*;
- c. Menyediakan personel pemadam kebakaran yang terlatih, minimal 6 personil dalam 1 unit kendaraan termasuk Alat Perlindungan Diri (APD) bagi personil Damkar;
- d. Sarana dan prasarana pada tanggap darurat serta sarana pendukung penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran maupun non kebakaran.

Rumus cara perhitungan indicator adalah:

$$\frac{\text{Jumlah luas WMK kabupaten/kota}}{\text{Jumlah luas potensi ancaman kebakaran kabupaten/ kota}} \times 100\%$$

Dalam Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kabupaten Temanggung terdapat 6 (enam) pos pelayanan WMK yaitu Pos Mako Temanggung, Pos Pemadam Candirototo, Pos Pemadam Pringsurat, Pos Pemadam Ngadirejo, Pos Pemadam Parakan, Pos Pemadam Tembarak.

Sampai saat ini baru berdiri 3 (tiga) pos pelayanan Pemadam Kebakaran yaitu:

1. Pos Mako Temanggung yang berada di lingkungan OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, beralamat di Jl. Lingkar Utara Maron Temanggung;
2. Pos Pemadam Wilayah Candirototo yang terletak dibelakang Kantor Kecamatan Candirototo, beralamat di Jl. Candirototo no. 32;
3. Pos Pemadam Wilayah Pringsurat yang terletak dibelakang Kantor Kecamatan Pringsurat, beralamat di Jl. Raya Pringsurat no. 1.

Cakupan pelayanan bencana kebakaran tahun 2016 s.d Tahun 2020 Tw IV dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10

**Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran  
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016  
s.d Tahun 2020 TW IV**

Uraian	satuan	2016	2017	2018	2019	2020s/d TW IV
Jumlah WMK Kabupaten/Kota	km2	528	528	528	528	528
Jumlah wilayah Kabupaten	km2	870,65	870,65	870,65	870,65	870,65
Cakupan Penanganan Bencana Kebakaran Kabupaten	%	60,64%	60,64%	60,64%	60,64%	60,64%

Sumber data : Satpol PP Damkar Kabupaten Temanggung, Tahun 2020 Tw IV

Dari data di atas, cakupan penanganan bencana kebakaran kabupatentidak mengalami peningkatan dikarenakan sampai dengan tahun 2020 tidak dapat terlaksana pembangunan pos pemadam kebakaran sehingga tidak terdapat penambahan pos, sehingga apabila melihat jangkauan luas layanan Kabupaten Temanggung cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten masih terbatas sejumlah 60%dari seluruh wilayah Kabupaten Temanggung.

**b. Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*)**

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan WMK adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industri dan tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

Rumus tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK adalah Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap dibagi Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK dikali 100%.

Realisasi persentase Tingkat Waktu Tanggap di Kabupaten Temanggung dari tahun 2016 s.d 2020 TW IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.11

## Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)

Kabupaten Temanggung, Tahun 2016 s.d Tahun 2020 TW IV

NO	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020 s/d TW IV
1.	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu 15 menit	33	41	44	33	30
2.	Jumlah kasus kebakaran dalam Jangkauan WMK	50	69	63	77	54
3.	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate-%)	66%	59,4%	69,8%	42,5%	55,5%

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Tw IV

Response time memiliki beberapa faktor kendala sebagai berikut:

- a) Lokasi kasus kebakaran yang berbeda-beda tempat setiap tahunnya;
- b) Keterlambatan masyarakat dalam melaporkan berita kebakaran;
- c) Lokasi Pos Pemadam Kebakaran yang terlalu jauh dari lokasi kebakaran;
- d) kepadatan penduduk dan kemacetan lalu lintas;
- e) Perubahankondisilalulintas;
- f) Perbedaan waktu tanggap yang dipengaruhi oleh kecepatan unit mobil kebakaran yang sebagian sudah berumur;
- g) Hambatan *akseleri* unit pemadam kebakaran antara lain wilayah Kabupaten Temanggung yang berkontour pegunungan, portal, jalan sempit, dll;
- h) Luasnya daerah layanan tidak sebanding dengan jumlah Pos Pembantu yang hanya berdiri di Pringsurat dan Candiroto serta minimnya sarana dan prasarana untuk pendukung penyelamatan dan evakuasi.
- i) Belum optimalnya koordinasi instansional.

Data kejadian kebakaran selama tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.12  
Data Kebakaran Kabupaten Temanggung

No.	Tanggal	Info Masuk	sampaiPe nyemprot an	Selesai	Pemilik/ Pelapor	Alamat	FungsiBa ngunan Yang Terbakar	Penyebab	Kerugian
1	01/01/2020	08:38:00	08:47:00	15:30:00	BpkHeru /PT.Duta Sumpit Indonesia	KrajanSoropadanPringsurat	LimbahPabrik	Percikanminyak	Rp 10.000.000
2	08/01/2020	06:30:00	06:36:00	09:00:00	BpkPramudianto	Kebumen RT 01 RW 02 KebumenPringsurat	Oven	Oven terlalupanas	Rp 10.000.000
3	01/02/2020	11:00:00	11:07:00	15:25:00	BpkLurah Pare	CV Rama Jaya DsnKamongan Pare Kranggan	Limbahpabrik	Human Error (ada orang membakar)	Rp 20.000.000
4	22/02/2020	09:45:00	11:00:00	12:00:00	Ibu suparmiBpk. Kadus	Dsn.Lawang RT 02 RW 02 Ds.PingitPringsuratTemanggung	Dapur, ruangmakan,	Tungku	Rp 25.000.000
5	03/03/2020	14:30:00	14:40:00	15:39:00	BpkSiyono	Dsn Condong RT 01/ RW 03 MojotengahKedu	Rumah	hubunganlistrikaruspendek	Rp 50.000.000
6	07/03/2020	00:30:00	00:50:00	03:12:00	Warga	Sengon RT 01 RW 03 BanjarsariNgadirajo	Rumah	hubunganlistrikaruspendek	Rp 250.000.000
7	15/03/2020	23:06:00	23:26:00	00:15:00	Ibu Yuli	Butuh RT 04 RW 02 Temanggung	Rumah	hubunganlistrikaruspendek	Rp 30.000.000
8	22/03/2020	02:11:00	02:18:00	02:45:00	warga/ Dahman	Butuh RT 02 RW 01	Dapur	Tungku	Rp 10.000.000
9	28/03/2020	15:22:00	15:42:00	17:00:00	CV. Larasati	TegesanSamiran, Kandangan	Dust collector	gesekanmesin	Rp 80.000.000
10	13/04/2020	09:57:00	10:13:00	13:00:00	BpkKariyadi	DsnLimbanganK entengsariCandiroto	Rumah	Korsleting Listrik	Rp 40.000.000
11	18/04/2020	18:36:00	18:55:01	19:47:00	Bpk Tri Age	Kalipan Barat 05/06 GondangWayang Kedu	JTR Listrik	Korsleting Listrik	
12	22/04/2020	02:24:00	02:30:00	10:43:00	KaryawanPabrik, Bpk.BambangHarjadi	PT.Sumber Makmur AnugrahJl.Magelang Semarang KM 16.1 PringsuratTemanggung	Gudang Textile	PercikanMesin Las	Rp 1.000.000.000
13	24/04/2020	20:30:00	20:50:00	21:15:00	Bpk.Isrok	Dsn.KetuwonWetan RT 01/ RW 02 Malebo Kandangan	Rumah	Lilin	Rp 30.000.000
14	17/05/2020	02:38:00	02:50:00	11:50:00	Ibu Cinta	Dsn.Tremas RT 01 RW 02 Kandangan	Pabrik Kayu	Kebocoran Oven	Rp 150.000.000
15	23/05/2020	21:57:00	22:20:00	22:49:00	Ibu Widi	Ds Mento MbawangCandir	Rumah	Korsleting Listrik	Rp 150.000

						oto			
16	04/06/2020	02:00:00	02:28:00	15:15:00	Bpk. Amir (KaryawanPabrik)	PT. ALBASIA KAYU PRIMA, Nguwet, Kranggan	Pabrik Kayu Lapis	Kebocoran oven (kedi)	Rp 20.000.000.000
17	06/06/2020	08:30:00	08:50:00	08:51:00	Bpk.Harsono	Gudang Pak Eko Kamongan RT 01 RW 03 NdiratKranggan Temanggung	Gudang	Korsleting Listrik	Rp 30.000.000
18	16/06/2020	20:10:00	20:15:00	21:35:00	Bp.Ganjar	Jl.Kartinidepan SMPN 1 Temanggung	Rumah	KebocoranTabung gas	Nihil
19	26/06/2020	14:21:00		15:37:00	Bp.Amir/ Bp.Taat	DesaKlepuKecamatanKranggan	Rumah/ Dapur	KebocoranTabung gas	Rp 5.000.000
20	02/07/2020	05:35:00	05:45:00	06:27:00	Ibu Upik	DsnNgemplakKecKedu	Bengkel Cat	Konsleting Mobil	Rp 300.000.000
21	05/07/2020	05:25:00	05:35:00	08:15:00	PegawaiPabrik	UD.INSAN BERKAH WalitelonTemanggung	Pabrikkayu	Oven terlalupanas	Rp 250.000.000
22	10/07/2020	08:50:00	09:00:00	09:15:00	SatpamPabrik	PT WAHANA AWET MAS KRANGGAN	Pabrikkayu	Kebocoran Oven	Rp 10.000.000
23	15/07/2020	20:48:00	21:00:00	00:15:00	PolsekPringsurat	PT .PWKWJlIn Raya KrangganPringsuratDs.KupenKec. pringsurat	Pabrikkayu	Boiler/ Serbuk	Rp 20.000.000
24	18/07/2020	11:10:00	11:20:00	11:20	Warga	TokoUntungJl.JendralSuprpto	BahanMudahTerbakar (B3)	Blmdiketahui	-
25	22/07/2020	22:20:00	23:00:00	03:00	Warga	Demangan, Rt 04 Rw 05 Jl.RayaNgadirejo	Ruko dan Warungmakan	Blmdiketahui	Rp 1.000.000.000
26	01/08/2020	20:40:00	20:50:00	23:00:00	Bp.Supriyono	DsnBatikanSoropadanPringsurat	Serbukpabrik	percikanapituingku	Rp 50.000.000
27	11/08/2020	09:07:00	09:22:00	11:30	Warga/ Mundakir	Dsn Salam, salamsariKedu	Rumah	Konsletinglistrik	Rp 50.000.000
28	14/08/2020	14:58:00	15:05:00	16:20	Warga/ Bpk. Warno	Dsn.KliwonanKupenPringsurat	Dapur	Kebocorantabung gas	Rp 500.000
29	15/08/2020	00:30:00	01:05:00	03:00	Bpk.Bungsu	Dsn.KeditanSelopampang	Pabrik	Tungkupenggorengan	Rp 100.000.000
30	15/08/2020	14:56:00	15:10:00	17:40	Warga	Dsn.karangkulon GunungPayungCandirototo	Rumah	Cerobong asap tungku	Rp 25.000.000
31	17/08/2020	13:15:00	13:45:00	16:00	Bpk.Sudirman	Dsn.Ngajaran RT03 02 KeblukanKaloran			Rp 50.000.000
32	19/08/2020	06:45:00	06:55:00	09:00	Bpk.Iwan	Dsn.DiwongsoWalitelon Utara TMG	Tumpukan serukkayu	Pembakaransampah	
33	21/08/2020	10:20:00	10:50:00	12:12	Bp.Edi Susilo/ Bp.Waluyo	Dsn.Mentorototo Candiroto	Rumah	Konsleting Listrik	Rp 5.000.000
34	22/08/2020	09:34:00	10:04:00	12:14	Bp.Jeri/ Bp.Sulistyon	DsnNglaranganTleterKaloran	Rumah	Konsletinglistrik	Rp 40.000.000
35	25/08/2020	12:37:00	12:48:00	14:16	Bp.TulusSuci	KrajanKebonsari	Rumah	Konsletinglistrik	Rp

	0				pto	Temanggung		rik	150.000.000
36	06/09/2020	12:01:00	12:40:00	13:15:15	Bp.Martoyo	DsnTening Ds Wonoboyo	Rumah	Tungku Pawon	Rp 450.000.000
37	14/09/2020	21:52:00	22:15:00	23:15:00	Warga	Dsn.CethakMadyocondroSecang	Pom mini	Percikanapi	Rp 25.000.000
38	25/09/2020	13:04:00	13:20:00		Ibu Lisa	dsnMluweh Ds GesingKandangan	Rumah	Tungku	Rp 10.000.000
39	28/09/2020	04:55:00	05:08:00	05:35:00	PT.Kayu Lima Utama, Prlapor :Satpam DSN	Jl.KrangganPringsurat	Pabrik	Venner	Rp 40.000.000
40	04/10/2020	18:51:00	19:00:00	01:00:00	Satpam PT. SGT (SensasiGunataTama)	Jl. Raya TemanggungKandangan KM 3 KabupatenTema nggung	Pabrik	Tungku boiler	Rp 50.000.000
41	12/10/2020	12:55:00	13:05:00	14:45:00	EilenSetyowati	PerumPuriKenca na Blok B No 16 Manding, Temanggung	Rumah	Kebocoran tabung gas	Rp 1.000.000
42	18/10/2020	11:30:00	11:40:00	12:40:00	Bpk.Subkhan	Lingk.Padangan Rt 03 Rw 03 Ds.Temanggung 1 Kab.Temanggung	Lahan	Pembakaran sampah	Rp 1.000.000
43	30/10/2020	13:07:00	13:15:00	16:55	Bp.RizalPT.AlbasiaTeman ggung Jaya	Jl. Raya KrangganPringsuratNguwet	Pabrik	Mesin Silo	Rp 25.000.000
44	06/11/2020	15:27:00	15:40:00	16:15:00	Ibu Ana	KarangsenengGemawang	Rumah	Kebocoran tabung gas	Rp 1.000.000
45	11/11/2020	10:07:00	10:14:00	11:20:00	Bp Kasiyono	Jl Raya Pringsurat (Kupen)	Mobil	Konsleting	Rp 10.000.000
46	12/11/2020	04:25:00	04:30:00	7:30:00	Warga	JlDiponegoroBrojolanTemanggung	Pabrikta hu	Tungkupenggo rengan	Rp 400.000
47	14/11/2020	13:25:00	13:45:00	18:00	Karyawan	PT AlbasiaTemang gung Jaya Jl Raya Pringsurat	Pabrikkayu	Mesin Silo	Rp 25.000.000
48	20/11/2020	02:00:00	02:05:00	08:30:00	Warga	Jampiroso RT 02/ RW 02 Temanggung	Ruko	Konsleting	Rp 2.500.000.000
49	22/11/2020	17:10:00	17:23:00	17:55:00	Warga	Mardisarikowan ganTemanggung	Mobil	Panas	Rp 1.000.000
50	25/11/2020	12:19:00	12:29:00	13:30:00	Satpam BNI	PetirejoNgadirejo	Warung Soto	Kebocorantab un gas	Rp 75.000.000
51	17/12/2020	10:40:00	15:40:00	16:07:00	Warga	DomponKranggan	Rumah	Kebocorantab un gas	Rp 50.000.000
52	17/12/2020	22:40:00	22:48:00	11:20:00	Bp Kasiyono	DsnNgemponNg adirejo	Ruko	Konsleting	Rp 50.000.000
53	19/12/2012	20:20:20	20:40:00	21:30:00	Bp Agus	DepanBaksoBalun ganParakan	Mobil	Konsleting	Rp 10.000.000
54	28/12/2020	11:53:00	12:11:00	13:05	Bp. Evan/ Bp.Dio	Jl. Gatot Subroto No 2 Manding	Ruko	Konsleting AC	Rp 5.000.000

Sumberdata :Satpol PP dan DamkarTahun 2020 Tw IV

**a. Presentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi**

Cakupan Satuan Petugas Pemadam Kebakaran pada kabupaten/kota yang memenuhi standar kualifikasi adalah Satuan Petugas Pemadam Kebakaran yang telah bersertifikasi melalui proses pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan yang berpotensi kebakaran dengan prinsip pengurangan resiko kebakaran. Cara perhitungan/Rumus perhitungan prosentase aparatur pemadam yang memenuhi standar kualifikasi adalah Jumlah Satgas Damkar memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi dibagi Jumlah Satgas Damkar dikali 100%

Tabel 2.13

Prosentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi Kabupaten Temanggung, Tahun 2016 s.d.Tahun 2020

NO	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar	17	19	18	18	19
2.	Jumlah aparatur pemadam kebakaran	44	54	53	53	54
3.	Prosentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	38,6%	35,2%	33,9%	35,9%	35,2%

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2020 TW IV

Sesuai table diatas prosentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi Kabupaten Temanggung di tahun 2019 adalah 18 orang di tahun 2020 mendapatkan 1 (satu) Kasi Pemadam Kebakaran sehingga jumlah personil menjadi 54 personil dan yang memenuhi standar menjadi 19 orang.

Penambahan anggota yang berstatus *supporting staff* sebanyak 40 personil selama 2016-2017 menjadikan jumlah aparatur pemadam kebakaran meningkat, akan tetapi peningkatan ini tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah aparatur yang memiliki kualifikasi.

Jumlah aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi dalam setiap tahun hanya mengalami sedikit peningkatan, terkendala dengan minimnya anggaran untuk biaya diklat bagi petugas dan status Satgas Damkar yang merupakan *supporting staff* sehingga tidak dapat dibiayai dari biaya Pendidikan dan Pelatihan BKPSDM Kabupaten Temanggung. Daftar anggota *pemadam* yang memiliki sertifikat tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.14

Daftar Personil Seksi Pemadam Kebakaran  
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran  
Tahun 2020

No.	Nama	NIP	Jabatan	Golongan/ Ruang	Sertifikat
1	2	3	4	5	6
1	RAMA ADHITIA CAHYA.SIP.MAP	19870303 200701 1 002	Kasi Damkar	III/c	Pelatihan Fire Fighting
2	BAMBANG SUPRIYONO	19670228 199303 1 009	Operator Mesin	III/b	Pelatihan Fire Fighting
3	KHAMIM MUSTAQIM, S.AP	19830513 201001 1 003	Pranata Pemadam Kebakaran	III/a	Pemadam Tingkat II
4	DEDY CHRISTANTO, S.AP	19811220 200801 1 008	Pranata Pemadam Kebakaran	III/a	Pemadam Tingkat I
5	MUSTRIWANTO, S.AP	19760229 200701 1 005	Pranata Pemadam Kebakaran	III/a	Diklat Fire Fighter Pertamina RU IV Cilacap
6	ARIF BUDI HARSANTO, S.Sos	19840609 201001 1 001	Pranata Pemadam Kebakaran	III/a	Diklat Fire Fighter Pertamina RU IV Cilacap
7	TRI ADE GIANTARA	19801104 200801 1 010	Operator Mesin	II/d	Diklat Fire Fighter Pertamina RU IV Cilacap

8	FARID NUR IKHSAN	19850324 200801 1 005	Operator Mesin	II/d	Pemadam Tingkat II
9	EDI SUSILO	19800705 200901 1 002	Operator Mesin	II/c	Diklat Fire Fighter Pertamina RU IV Cilacap
10	TONI KUSTANTO	19830418 201001 1 002	Operator Mesin	II/c	Diklat Fire Fighter Pertamina RU IV Cilacap
11	ELING SETIYONO	19830808 201001 1 002	Operator Mesin	II/c	Diklat Fire Fighter Pertamina RU IV Cilacap
12	ARIF SOFWAN	19840609 201001 1 001	Operator Mesin	II/c	Diklat Fire Fighter Pertamina RU IV Cilacap
13	ACHMAD SYAFI'I	19760622 200701 1 007	Operator Mesin	II/a	Diklat Fire Fighter Pertamina RU IV Cilacap
14	WALDI HARSANTO	19770206 200801 1 009	Operator Mesin	I/d	Pemadam Tingkat I
<b>Satgas Pemadam Kebakaran</b>					
15	AHMAD SYARIF A.	-	Satgas	-	-
16	ANDI ACHMAD MUZAKAR	-	Satgas	-	-
17	ANGGIANSYAH MADHON S.	-	Satgas	-	-
18	ARDYARDANY PUTRA	-	Satgas	-	-
19	ARLI TAUFIK	-	Satgas	-	-
20	AWAN SUKMA FEBRIYANTO	-	Satgas	-	-
21	BAYU KURNIAWAN	-	Satgas	-	-
22	BAGUS SATRIO W.	-	Satgas	-	-
23	BHURHANUDIN ALFANI R.	-	Satgas	-	Diklat Fire Fighter Pertamina RU IV Cilacap
24	DAVIT HIMAWAN UTOYO	-	Satgas	-	-
25	DHIMAS BANGKIT PANUNTUN	-	Satgas	-	Diklat Fire Fighter Pertamina RU IV Cilacap
26	FAJAR PRASTIYO	-	Satgas	-	-
27	FAJRIYAH WIDI ASTUTI	-	Satgas	-	-
28	FANDI CAHYA PRADANA	-	Satgas	-	-
29	HAFIDZ NURUL AMIN	-	Satgas	-	-
30	HARIS PRASETYO	-	Satgas	-	Diklat Fire Fighter

					Pertamina RU IV Cilacap
31	HASAN TAFSIR	-	Satgas	-	Diklat Fire Fighter Pertamina RU IV Cilacap
32	IRA CAHYANING	-	Satgas	-	-
33	ISROK HADIYANTO	-	Satgas	-	-
34	IVAN PAMUNGKAS	-	Satgas	-	Diklat Fire Fighter Pertamina RU IV Cilacap
35	JONTA AYOMAGE AKITA	-	Satgas	-	-
36	KENJI EGI RIKO SAPUTRO	-	Satgas	-	-
37	KOKO SEPTIANTORO	-	Satgas	-	-
38	LUKMAN KHAQIM	-	Satgas	-	-
39	MARTHA EDY FIRMANSYAH	-	Satgas	-	-
40	MOCHAMAD FAIZAL R.	-	Satgas	-	-
41	MUHAMMAD HASBI ASSIDIQI	-	Satgas	-	-
42	MUHAMMAD NURROKHIM	-	Satgas	-	-
43	MUHAMMAD TOYYIB NUR RAHMAN	-	Satgas	-	-
44	NUR RIFA FADHLIKA	-	Satgas	-	-
45	OVAN ADI RIYANTO	-	Satgas	-	-
46	PANGESTU MULYA NOVANTO	-	Satgas	-	-
47	RUDI PRASETYO	-	Satgas	-	-
48	SADDAM GIRI SANTOSO	-	Satgas	-	-
49	SEPTIAN DWI CAHYO AJI	-	Satgas	-	-
50	SLAMET ARIYANTO	-	Satgas	-	-
51	SUHUD KURNIAWAN	-	Satgas	-	-
52	TAUFIK PRASTYAWAN	-	Satgas	-	-
53	TULUS SETYANTO	-	Satgas	-	-
54	UJIEK PRASTIYO	-	Satgas	-	-

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2020 TW IV

### 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dari 7 indikator terdapat 5 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:

- Indikator Rasio Petugas Satpol PP

Hal ini disebabkan karena jumlah Satpol PP di Kabupaten Temanggung seharusnya sebanyak 150 sampai dengan 250 pegawai, sedangkan jumlah Pol PP yang ada di Kabupaten Temanggung baru tersedia sejumlah 86 personil (menurun dikarenakan ada mutasi pegawai dan ada pegawai yg pensiunakan tetapi dari jumlah itu masih terdapat kekurangan minimal sejumlah 64 personil,akan tetapi dengan jumlah personil yang ada sudah dapat melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Fluktuasi pada tahun-tahun sebelumnya dikarenakan adanya penarikan Satpol PP yang bertugas mengamankan asset daerah digantikan oleh Satpam, mutasi pegawai, pensiun, dan tidak ada pengangkatan Satpol PP yang baru

- Indikator Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Hal ini disebabkan karena jumlah linmas di Kabupaten Temanggung dari rasio 1 : 1 ( satu RT : satu Linmas ), sudah mencukupi, namun penyebarannya yang kurang merata. Di Kecamatan Kaloran jumlah RT 416 sedangkan jumlah linmasnya 349 orang, sehingga ada kekurangan 67 linmas, di Kecamatan Kedu kekurangan 99 linmas, di Kecamatan Kranggan kekurangan 15 linmas. Akan tetapi di kecamatan yang lain jumlah linmasnya rata-rata lebih banyak dr jumlah RT.

- Indikator Cakupan Penanganan Bencana Kebakaran Kabupaten

Hal ini disebabkan karena cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten tidak mengalami peningkatan dikarenakan sampai dengan tahun 2020 tidak dapat terlaksana pembangunan pos pemadam kebakaran sehingga tidak terdapat penambahan pos, sehingga apabila melihat jangkauan luas layanan Kabupaten Temanggung cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten masih terbatas sejumlah 60% dari seluruh wilayah Kabupaten Temanggung.

- Indikator Cakupan Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*)

Hal ini disebabkan karena Response time memiliki beberapa faktor kendala sebagai berikut:

- a) Lokasi kasus kebakaran yang berbeda-beda tempat setiap tahunnya;
- b) Keterlambatan masyarakat dalam melaporkan berita kebakaran;
- c) Lokasi Pos Pemadam Kebakaran yang terlalu jauh dari lokasi kebakaran;
- d) kepadatan penduduk dan kemacetan lalu lintas;
- e) Perubahankondisi lalu lintas;
- f) Perbedaan waktu tanggap yang dipengaruhi oleh kecepatan unit mobil kebakaran yang sebagian sudah berumur;
- g) Hambatan *akseleri* unit pemadam kebakaran antara lain wilayah Kabupaten Temanggung yang berkontour pegunungan, portal, jalan sempit, dll;
- h) Luasnya daerah layanan tidak sebanding dengan jumlah Pos Pembantu yang hanya berdiri di Pringsurat dan Candiroto serta minimnya sarana dan prasarana untuk pendukung penyelamatan dan evakuasi.
- i) Belum optimalnya koordinasi instansional.

- Indikator Presentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi

Hal ini disebabkan karena Jumlah aparaturnya Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi dalam setiap

tahun hanya mengalami sedikit peningkatan, terkendala dengan minimnya anggaran untuk biaya diklat bagi petugas dan status Satgas Damkar yang merupakan *supporting staff* sehingga tidak dapat dibiayai dari biaya Pendidikan dan Pelatihan BKPSDM Kabupaten Temanggung.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, antara lain :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), baik dalam hal SDM Satuan Polisi Pamong Praja maupun Pemadam Kebakaran.
2. Masih minimnya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi
3. Kurangnya sarana prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
4. Adanya pandemic Covid-19 yang melanda di seluruh penjuru dunia sehingga anggaran dan kegiatan di Tahun 2020 di-refocusing untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 (banyak yang tidak mencapai target)
5. Masih kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap kesadaran penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kesadaran terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
7. Menurunnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan;
8. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya ketentraman dan ketertiban umum;
9. Perlunya peningkatan kemampuan SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat dan Petugas Pemadam Kebakaran dalam menghadapi permasalahan kedepan yang semakin kompleks;

10. Sarana dan prasarana pendukung untuk peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran masih belum memenuhi standar kebutuhan;
- Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar dilakukan upaya penunjang pelaksanaan kegiatan melalui :
    1. Intensifikasi rapat koordinasi di tingkat *low manager* sampai dengan pengambil kebijakan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kinerja kegiatan dinas
    2. Terdapat dukungan, peran serta dan kerjasama dengan kemitraan dalam rangka penegakan perda
    3. Mengoptimalkan sarana dan prasarana dinas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat lebih memudahkan komunikasi dan interaksi dengan masyarakat guna mewujudkan pelayanan prima penegakan perda.
    4. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawai.
    5. Melaksanakan sosialisasi, edukasi dan pembinaan secara rutin dan mengintensifkan patroli
    6. Mengikutsertakan personil untuk mengikuti Diklat, bimbingan teknis, ataupun mengikuti lomba yang bersifat pengembangan kapasitas aparatur
    7. Ketersediaan anggaran yang memadai sebagai penunjang keberhasilan pencapaian target tujuan

#### **2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD**

*Review* atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Terdapat penambahan sub kegiatan di luar rancangan awal

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung, yaitu sejumlah 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengembangan kapasitas dan karier PPNS
  - b. Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
11. Sesuai hasil analisa kebutuhan terdapat penambahan anggaran pada beberapa sub kegiatan yaitu:
- a. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - e. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - f. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
  - g. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
  - h. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
  - I. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
  - j. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
  - k. Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.15 berikut:

Tabel 2.15

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2022

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						1	PERENCANAAN PEMBANGUNAN						
A.	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						A.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah						
1	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Temanggung	Terlaksananya Dokumen Perencanaan, Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	5	dokumen	1.500.000	1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD	Kab Temanggung	Terlaksananya Dokumen Perencanaan, Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	15	buku	1.500.000	
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD	Kab. Temanggung	Terlaksananya Dokumen Perencanaan, Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	5	dokumen	1.500.000		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Temanggung	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	13	bulan	5.041.656.000		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Temanggung	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	14	bulan	5.041.656.000	
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggung	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	13	bulan	5.041.656.000		Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah						
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Kab. Temanggung	Terlaksananya pengadaan Pakaian Dinas Khusus Satpol PP dan Damkar (stel pakaian jadi)	128	stel	128.000.000		Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab Temanggung	Terlaksananya pengadaan Pakaian Dinas Khusus Satpol PP dan Damkar (stel pakaian jadi)	140	stell	127.999.140	
a	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Temanggung	Terlaksananya pengadaan Pakaian Dinas Khusus Satpol PP dan Damkar (stel pakaian jadi)	128	stel	128.000.000		Administrasi umum perangkat daerah						
4	Administrasi umum perangkat daerah							Administrasi umum perangkat daerah						

RANCANGAN AWAL RKPDP 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
a	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Temanggung	Tercukupinya komponen instalasi listrik dan bangunan kantor	12	bulan	7.000.000		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Temanggung	Tercukupinya komponen instalasi listrik dan bangunan kantor	12	bulan	6.999.950	
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Temanggung	Tersedianya LCD (rusak) dan 1 unit laptop	3	unit	15.000.000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Temanggung	Tersedianya 3 unit laptop	3	unit	15.000.000	
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Temanggung	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor			1.500.000		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Temanggung	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor	3	unit	1.498.200	
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung	Tercukupinya ATK, makan minum harian pegawai dan alat kebersihan kantor	12	bulan	94.400.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung	Tercukupinya ATK, dan alat kebersihan kantor	12	bulan	94.400.000	
e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Temanggung	Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan.	12	bulan	7.000.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Temanggung	Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan	12	bulan	6.999.700	
f	Penyediaan bahan/Material	Kab. Temanggung	Tersedianya bahan/material/bangunan	12	bulan	10.000.000		Penyediaan bahan/Material	Kab. Temanggung	Tersedianya bahan/material/bangunan	12	bulan	10.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
g	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung	Tersedianya jamuan makan minum tamu	12	bulan	5.000.000	1	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung	Tersedianya makan minum harian pegawai, jamuan makan minum tamu dan makan minum rapat	12	bulan	5.000.000	
h	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	12	bulan	55.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	12	bulan	54.983.500	
								Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
								Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Temanggung	Tersedianya bendera Pataka beserta kelengkapannya (3x Rp. 4.000.000)	3	unit	0	
5	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah							Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah						
a	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Temanggung	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12	bulan	2.000.000		Penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Temanggung	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12	bulan	1.999.800	
b	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Temanggung	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan internet	12	bulan	70.000.000		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Temanggung	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan internet	12	bulan	70.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
c	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Temanggung	Tersedianya jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	12	bulan	8.000.000		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Temanggung	Tersedianya jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	12	bulan	7.983.900	
d	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Temanggung	Tercukupinya honor penjaga malam, tenaga pendukung administrasi tenaga kebersihan, makan minum rapat dan ucapan selamat	12	bulan	187.225.000		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Temanggung	Tercukupinya honor penjaga malam, tenaga pendukung administrasi tenaga kebersihan dan ucapan selamat	12	bulan	187.224.000	
6	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah							Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah						
a	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab. Temanggung	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	bulan	50.000.000		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab. Temanggung	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	bulan	50.000.000	
b	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan	Kab. Temanggung	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	12	bulan	80.000.000		Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan	Kab. Temanggung	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	12	bulan	79.997.500	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	dinas operasional atau lapangan		atau Lapangan					dinas operasional atau lapangan		atau Lapangan				
c	Pemeliharaan mebel	Kab. Temanggung	Terpeliharanya mebel			2.173.400		Pemeliharaan mebel					2.155.300	
B	Program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban Umum							Program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban Umum						
1	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota							Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota						
a	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Kab. Temanggung	Terlaksananya patroli, pengamanan dan pengawalan pejabat negara dan daerah	12	bulan	20.000.000		Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Kab. Temanggung	Terlaksananya patroli, pengamanan dan pengawalan pejabat negara dan daerah	12	bulan	20.000.000	
b	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan	Kab. Temanggung	Terlaksananya penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa			10.000.000		Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan	Kab. Temanggung	Terlaksananya penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	12	bulan	10.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa							penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa						
c	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kot	Kab. Temanggung	Terbayarnya honor SS Banpol 30 orang x 13 bulan, BRJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	13	bulan	850.000.000		Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kot	Kab. Temanggung	Terbayarnya honor SS Banpol 30 orang x 13 bulan, BRJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	13	bulan	850.000.000	
d	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Temanggung	Terlaksananya pengamanan pilkades dengan aman, tertib, dan lancar					Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Temanggung	Terlaksananya pengamanan pilkades dengan aman, tertib, dan lancar	37	desa	0	
d	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang	Kab. Temanggung K	Terlaksananya peningkatan kapasitas korpisik dan penampilan dalam upacara kenegaraan	12	bulan	50.000.000		Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang	Kab. Temanggung	Terlaksananya peningkatan kapasitas korpisik dan penampilan dalam upacara kenegaraan	12	bulan	50.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
e	bernuansa Hak Asasi manusia	Kab. Temanggung	Terlaksananya kerjasama antar instansi dalam penanganan PKL dan gangguan ketentraman dan ketertuban umum lainnya	12	bulan	75.000.000	1	bernuansa Hak Asasi manusia	Kab Temanggung	Terlaksananya pembinaan linmas tingkat kecamatan se-kabupaten temanggung	618	orang	0	
	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertuban umum							12			bulan	75.000.000		
	Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana ketentraman dan ketertuban umum							Kab Temanggung			Tersedianya kartu tanda anggota linmas	8414	buah	
g	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Kab. Temanggung	Terlaksananya penyusunan SOP Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	12	bulan	10.000.000	1	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Kab Temanggung	Terlaksananya penyusunan SOP Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	12	bulan	10.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter angan	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7		
2	Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota								Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota						
							a	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab Temanggung	Terlaksananya koordinasi tentang pemberkasan PPNS	12	bulan	0		
							b	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab Temanggung	Terselenggaranya sosialisasi Perda bagi PKL, pengusaha dan masyarakat umum	3	kegiatan	0		
a	Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota	Kab. temanggung	Tertanganinya Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota			80.000.000		Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota	Kab Temanggung	Tertanganinya Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	12	bulan	80.000.000		
C	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran							Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran							
1	Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota							Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota							
a	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Tercapainya respon time damkar dari pos terdekat ke lokasi kebakaran sampai dengan air keluar maksimal 15 menit, Meminimalisir dampak kejadian	12	bulan	75.683.800		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab Temanggung	Tercapainya respon time damkar dari pos terdekat ke lokasi kebakaran sampai dengan air keluar maksimal 15 menit, Meminimalisir dampak kejadian	12	bulan	77.008.600		

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
b	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Kab. Temanggung	kebakaran berupa korban jiwa dan harta benda  Terlindunginya keselamatan petugas damkar dalam penanganan kejadian kebakaran	12	bulan	70.000.000		Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Kab. Temanggung	kebakaran berupa korban jiwa dan harta benda  Terlindunginya keselamatan petugas damkar dalam penanganan kejadian kebakaran, dan terpenuhinya pembuatan sumur bor dan ground tank di pos candiroto, maron dan pringsurat (Rp. 838.514.342)	12	bulan	293.383.200	
c	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Kab. Temanggung	Terpenuhinya standarisasi sarpras dalam penanganan kejadian kebakaran	12	bulan	75.000.000		Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Kab. Temanggung	Terpenuhinya standarisasi sarpras dalam penanganan kejadian kebakaran, terpenuhinya pengadaan APD (Rp. 155.250.000) dan pengadaan mobil rescue (Rp. 1.870.000.000)	12	bulan	201.843.400	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
d	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Kab. Temanggung	Tecukupinya kebutuhan pokok aparatur damkar antara lain gaji Satgas Damkar (40 orang), jaminan kesehatan/ keternagakerja an dll	53	orang	1.137.940.800		Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Kab. Temanggung	Tecukupinya kebutuhan pokok aparatur damkar antara lain gaji Satgas Damkar (40 orang), jaminan kesehatan/ keternagakerja an dll	53	orang	1.080.520.800	
<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>							<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>							
e	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kab. Temanggung	Terdatanya kualitas dan kuantitas sarpras proteksi kebakaran di instansi pemerintah, instansi swasta atau pemukiman masyarakat	36	instansi	20.000.000		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kab. Temanggung	Terdatanya kualitas dan kuantitas sarpras proteksi kebakaran di instansi pemerintah, instansi swasta atau pemukiman masyarakat	36	instansi	30.420.000	
<b>Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran</b>							<b>Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran</b>							
f	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulan n kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Kab. Temanggung	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kejadian kebakaran	12	bulan	14.376.000		Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulan n kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Kab. Temanggung	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kejadian kebakaran (hasil musrenbang untuk pelatihan Rp. 27.132.000)	12	bulan	99.479.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
g	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Kab. Temanggung	Terpenuhinya sarpras pendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat/relawan damkar	12	bulan	100.000.000		Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Kab. Temanggung	Terpenuhinya sarpras pendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat/relawan damkar	12	bulan	0	
h	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Kab. Temanggung	Terbentuknya relawan kebakaran di setiap desa/keurahan se-Kabupaten Temanggung	150	Desa/keurahan	28.274.000		Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Kab. Temanggung	Terbentuknya relawan kebakaran di setiap desa/keurahan se-Kabupaten Temanggung	150	Desa/keurahan	213.467.000	
i	<b>Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan /atau mengancam keselamatan manusia</b> Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Kab. Temanggung	Terlayannya operasi pencarian dan pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia seperti operasi tangkap Tawon, oli/solar tumpah, tanah longsor, penanganan hewan berbisa,	12	bulan	20.000.000		<b>Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan /atau mengancam keselamatan manusia</b> Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Kab. Temanggung	Terlayannya operasi pencarian dan pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia seperti operasi tangkap Tawon, oli/solar tumpah, tanah longsor, penanganan hewan berbisa,	12	bulan	18.171.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			dll							dll				
j	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Kab. Temanggung	Terpenuhinya standarisasi sarpras dan terlindunginya keselamatan petugas damkar dalam penanganan Pencarian serta Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	12	bulan	90.000.000		Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Kab. Temanggung	Terpenuhinya standarisasi sarpras dan terlindunginya keselamatan petugas damkar dalam penanganan Pencarian serta Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	12	bulan	136.681.600	

Sumber :Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

## 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Namun dalam proses ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.16

Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat  
Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
1	Program Penanggulangan Kebakaran				
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Kecamatan Parakan	Terselenggaranya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat kepada 60 orang peserta	200.000.000	

## 2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ada 2 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.17  
Daftar Inovasi Perangkat Daerah  
2019-2021

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1.	Satpol PP Sahabat Santri	Satpol PP, stokholder di Pondok Pesantren	APBD	Mengadakan sosialisasi bersama dan kegiatan untuk meningkatkan amal makruf nahi mungkar	Perjanjian Kerjasama	Meningkatnya kesadaran masyarakat lewat amar makruf nahi mungkar dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Temanggung	2020 Juara II Lomba Inovasi Satpol PP Tingkat Provinsi Jawa Tengah
2.	Satlinmas Geplak Gandem	Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)	APBD	Melaksanakan sosialisasi dan membentuk Barisan Relawan beranggotakan Satlinmas	Barisan Relawan Satlinmas dalam pencegahan kebakaran	Satlinmas sebagai garda terdepan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	2020 Juara II Lomba Inovasi Satlinmas Satpol PP Tingkat Provinsi Jawa Tengah

Pada tahun 2021, Satpol PP Damkar akan melaksanakan inovasi terkait Tatanan New Normal Covid-19 yaitu Sinergitas antara Satpol PP, Damkar dan Satlinmas dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 berupa Patroli Edukasi Waspada Covid-19, Stay Save, Stay Healthy.

### 2.7. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ada 11 Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.18  
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung  
Tahun 2019-2021

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Juara Harapan II Linmas Got Tallent	SATPOL PP PROVINSI JAWA TENGAH (Jambore Satlinmas Tingkat Provinsi Jawa Tengah)	Provinsi	Satpol PP dan Damkar
2	Juara I Estafet/Outbond			
3	Juara II How to Find the Fighter (HTF)			
4	Juara Harapan II Volly Ball			
5	Juara Penjaring Terbaik HTF			
6	Juara III Defile HUT TNI ke - 74	Kodim 0706 Temanggung		
7	Juara III KRENOVA (Kreativitas dan Inovasi Perangkat Daerah)	BAPPEDA Temanggung		
8	Juara Harapan I Satpol PP Favorit	SATPOL PP PROVINSI JAWA TENGAH (Jambore Satpol PP Tingkat Provinsi Jawa Tengah)		
9	Juara 3 Outbod			
10	Juara Harapan I PBB			
11	Juara I Defile HUT TNI ke - 74	Kodim 0706 Temanggung		

### BAB III

## TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh (Perangkat Daerah) lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh (Perangkat Daerah) Kabupaten Temanggung.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung yang melaksanakan urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat. Dalam rangka melaksanakan urusan tersebut, maka Satpol PP dan Pemadam Kebakaran perlu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memasukkan indikator baru yang belum termuat dalam RPJMD 2019-2023 berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal pada SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dengan jenis pelayanan dasar terdiri atas :

a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum ;

Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada meliputi:

- o pelayanan kerugian materil; dan
- o pelayanan pengobatan.

Kerugian materil berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada.

Kerugian materil sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- o rusak ringan, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan; dan
- o rusak sedang dan/atau berat, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama dan/atau lebih dari 2,5% (dua koma lima

persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan.

Pelayanan pengobatan berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat.

Penerima Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum, yaitu warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda provinsi dan kabupaten/kota serta Perkada. Warga negara dengan kriteria:

- yang mengalami kerugian materil dan/atau cedera fisik akibat penegakan Perda dan Perkada; dan/atau
- berada pada jarak antara 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh) meter dari lokasi penegakan Perda dan Perkada.

Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dilaksanakan dengan cara menaksir dan menghitung kerugian materi yang dialami yang melibatkan juru taksir sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam:

- Program dan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Pemerintah Daerah; dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dalam bentuk dokumen RPJMD dan RKPD;
- Dokumen perencanaan perangkat daerah dalam bentuk dokumen Renstra dan Renja; dan dokumen anggaran Pemerintah Daerah dalam bentuk APBD.
- Satpol PP dalam menyusun dokumen rencana perangkat daerah agar memprioritaskan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar;
- Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan memastikan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar dituangkan dalam dokumen Renstra dan dokumen Renja;

- Tim anggaran Pemerintah Daerah memastikan pendanaan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya;
- Penyediaan pelayanan kerugian materi dan pelayanan pengobatan yang dilakukan oleh Satpol PP;
- Dan Satpol PP menetapkan capaian standar Pelayanan Dasar berdasarkan jumlah warga negara yang terkena dampak dan telah tertangani setiap tahunnya.

Dalam hal terdapat warga negara:

- ➔ Terkena dampak kerugian materil akibat penegakan Perda dan Perkada, Satpol PP memberikan perbaikan atas barang atau aset pribadi yang layak;
- ➔ Terkena dampak kerugian cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada, Satpol PP memberikan tindakan pengobatan pertolongan pertama; dan terkena dampak kerugian cedera fisik yang memerlukan penanganan lebih lanjut akibat penegakan Perda dan Perkada, Satpol PP memberikan fasilitasi pengobatan di pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit umum Pemerintah Daerah.
- ➔ Perbaikan atas kerugian materil dan cedera fisik ringan pendanaannya 2,5 (dua koma lima persen) dari anggaran operasional kegiatan penegakan Perda dan Perkada.

b. Pelayanan informasi rawan bencana;

c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana ;

d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana ;

e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota ;

Dikarenakan penerapan SPM belum masuk di dalam RPJMD 2018-2023 maka untuk kedua jenis layanan dasar tersebut masih diuraikan dalam indikator berdasarkan Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1. Pelayanan Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

Pelayanan Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat mencakup 3 (tiga) indikator pelayanan, yaitu :

a. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota

Cakupan penegakan perda dan peraturan kepala daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran perda yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh anggota satuan polisi pamong praja.

Penyelesaian pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah oleh satuan polisi pamong praja dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur satuan polisi pamong praja yaitu tindakan *preventif non yustisial* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Apabila pelanggaran terhadap perda mengandung unsur pidana dan daerah tersebut telah memiliki PPNS, satuan polisi pamong praja dapat meneruskan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan

b. Patroli Siaga Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat

Patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah frekuensi patroli yang dilaksanakan oleh kelompok anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk selanjutnya disebut kelompok patroli (KP) di setiap kecamatan yang berada di kabupaten/kota.

Patroli dilakukan pada lokasi yang sangat memerlukan pantauan, antara lain: tempat-tempat atau lokasi yang dianggap rawan, antar batas wilayah, dan tempat keramaian/hiburan.

Apabila telah tercipta kondisi 3 (tiga) kali patroli dalam sehari di seluruh kecamatan pada kabupaten/kota, maka kinerja minimal dari pelaksanaan patroli tersebut telah dianggap terpenuhi.

- c. Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat di Kabupaten/Kota  
Rasio petugas linmas di kabupaten/kota adalah jumlah satuan perlindungan masyarakat pada tingkat RT atau sebutan lainnya yang tugasnya membantu pelayanan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut membantu memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

## 2. Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran

Pelayanan penanggulangan bencana kebakaran mencakup pelayanan kepada masyarakat pada pra kebakaran, saat kejadian kebakaran dan *pasca* kebakaran di kawasan permukiman, bangunan gedung publik, pabrik/industri, hutan dan lahan yang merupakan wilayah yurisdik tanggung jawab pemerintah daerah otonom.

Untuk menghindari kekosongan pelayanan kepada masyarakat ditetapkan SPM indikator kinerja pemerintahan daerah sebagai alat ukur akses dan mutu pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di daerah. Pengaturan SPM penanggulangan kebakaran meliputi:

### a. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten/Kota

Bencana kebakaran adalah setiap peristiwa bencana yang disebabkan karena kebakaran dan dapat menimbulkan kerugian materiil maupun korban jiwa, gangguan kesehatan dan lingkungan. Cakupan pelayanan bencana kebakaran mencerminkan berapa persen luas lingkungan dan/atau wilayah potensi kebakaran dan rentan kebakaran yang mendapat WMK untuk mendapat layanan proteksi ancaman bencana kebakaran.

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di kabupaten/kota adalah:

- WMK dibentuk pada pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan.
- WMK perlu dilengkapi dengan mitigasi, sistem peringatan dini dapat melalui alarm dan sejenisnya, pemberitahuan kebakaran yang terintegrasi dalam WMK, kesiapsiagaan, pos pelayanan pemadam kebakaran, sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- WMK ditentukan oleh tingkat waktu tanggap (*response time*) dari pos pelayanan pemadam kebakaran terdekat yang memiliki satuan petugas pemadam kebakaran yang terlatih bersertifikasi, memiliki mobil pemadam kebakaran dan/atau peralatan penyemprotan pemadam api yang terintegrasi dengan ketersediaan sumber air dan/atau penyemprotan racun api dan alat pendukung pemadam api sesuai dengan tipologi kebakaran.

Daerah layanan WMK ditentukan oleh tingkat waktu tanggap, tingkat waktu tanggap pada permukiman, bangunan gedung publik, pabrik/industri tidak lebih dari 15 (lima belas) menit dan tingkat waktu tanggap pada kawasan hutan dan kebakaran tertentu tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit, satuan petugas pemadam kebakaran lengkap unit mobil atau mesin pompa air pemadam kebakaran atau sarana dan prasana pemadam lainnya telah tiba di tempat kejadian kebakaran yang langsung melakukan penyemprotan air dan/atau bahan pemadam api lainnya, pertolongan penyelamatan jiwa dan keselamatan harta benda.

Berdasarkan ketentuan ini, kepala daerah menetapkan bahwa setiap lingkungan dan/atau kawasan yang berpotensi ancaman kebakaran diwajibkan membentuk WMK dengan berdasarkan rencana induk sistim proteksi kebakaran dengan tujuan pengurangan resiko kebakaran dengan luas disesuaikan dengan kondisi dan jenis potensi atau tipologi kebakaran serta menyusun rencana induk sistim proteksi kebakaran dengan tujuan pengurangan resiko kebakaran.

Suatu lingkungan dan/atau kawasan yang memiliki potensi ancaman kebakaran tetapi tidak membentuk WMK

dikategorikan sebagai daerah tidak terlindungi (*unprotected area*).

Daerah yang sudah membentuk WMK maka satuan tugas pemadam kebakaran harus melakukan inspeksi secara berkala terhadap peralatan proteksi kebakaran dan menyediakan personel pemadam kebakaran yang terlatih, sarana dan prasarana pada tanggap darurat antara lain mobil pemadam kebakaran, pompa air pemadam api yang dapat digunakan dimana saja, pos pelayanan pemadam kebakaran ditengah WMK.

b. Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan WMK

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan WMK adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industri dan tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

c. Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi

Cakupan Satuan Petugas Pemadam Kebakaran pada kabupaten/kota yang memenuhi standar kualifikasi adalah Satuan Petugas Pemadam Kebakaran yang telah bersertifikasi melalui proses pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan yang berpotensi kebakaran dengan prinsip pengurangan resiko kebakaran.

d. Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3000-5000 Liter Pada WMK

Jumlah mobil dan/atau mesin damkar Diatas 3000-5000 Liter pada WMK adalah cakupan mobil dan/atau mesin pemadam kebakaran yang disediakan pemerintah daerah yang layak pakai untuk mendukung tindakan waktu tanggap darurat kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran dan/atau WMK

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2022, maka tujuan dari penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam rangka akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2022 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Temanggung pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan perspektif sejarah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung telah banyak mengalami banyak perubahan ruang lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi yang mengikuti dinamika tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan kekuatan yang dimiliki dan untuk meminimalisir kelemahan-kelemahan internal Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung, maka dalam merumuskan skenario ke depan harus dilandasi dengan prinsip keunggulan kompetitif dan keamanan manajemen Satuan Polisi Pamong Praja sehingga dengan adanya prinsip ini diharapkan

keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dapat menjadi lembaga terdepan dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan peraturan kepala Daerah serta perlindungan masyarakat kepada masyarakat di Temanggung.

Atas dasar prinsip tersebut di atas, maka visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung kurun waktu 5 tahun ke depan adalah :

#### **A. Tujuan**

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selama Tahun 2019-2023 adalah **“Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas”** dengan memperhatikan indikator tujuan yaitu Indeks Rasa Aman. Sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai upaya untuk mewujudkan Kabupaten Temanggung Tentrem, Marem dan Gandem.

#### **B. Sasaran**

Sasaran Jangka Menengah yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam rangka pencapaian tujuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selama Tahun 2018-2023, dijabarkan sebagai berikut:

**Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas**

**Sasaran :**

1. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum
2. Meningkatnya kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.19

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran  
Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -				
					1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan Penegakan Perda dan Peraturan Bupati	%	100	100	100	100	100
			Rasio Petugas Satpol PP	Rasio	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
		Meningkatnya perlindungan masyarakat	Rasio Linmas per RT	Rasio	1,48	1,62	1,62	1,62	1,62
		Meningkatnya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	%	60,64	60,64	60,64	60,64	60,64
			Tingkat Waktu Tanggap (response time)	%	65	66	66,50	67	67,50
			Presentase aparatur yang memenuhi standar kualifikasi	%	40	41	42	43	44

Tabel 2.20  
 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja  
 dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten  
 Temanggung Tahun 2022

**VISI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023**  
 TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2022	TARGET KONDISI AKHIR 2022
Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan, serta partisipasi pemangku kepentingan perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat waktu	%	100	100
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas data pembangunan dan data statistik daerah	Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Besaran ketersediaan data statistik		8	42
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang didukung dengan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pelaku perencanaan	Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;	Persentase Anggaran Penatausahaan PERANGKAT DAERAH terhadap Total Belanja Langsung PERANGKAT DAERAH dalam 1 (satu) Tahun	%	26	26

Sumber : Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.

Kebijakan dan strategi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2019-2023.

Kebijakan dan strategi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.21  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan.</li> <li>2. Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.</li> <li>3. Peningkatan sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta implementasinya di lapangan.</li> <li>4. Pemberdayaan masyarakat untuk</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan melalui penegakan peraturan daerah, penurunan angka kriminalitas, penanganan demonstrasi, dan patroli siaga serta ketersediaan tenaga linmas di masyarakat</li> <li>2. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.</li> <li>3. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan</li> </ol>

		<p>menciptakan suasana tenteram dan tertib di masyarakat.</p> <p>5. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur.</p>	<p>sosialisasi bersama-sama Instansi pelaksana Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.</p> <p>4. Meningkatkan efektifitas kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan suasana tenteram dan kondisi tertib di masyarakat</p> <p>5. Meningkatkan efektifitas pendidikan dan pelatihan.</p>
	<p>Meningkatnya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran</p>	<p>Meningkatnya cakupan pelayanan kebakaran</p>	<p>1. Pemetaan potensi ancaman bahaya kebakaran di seluruh jenis/tipologi kebakaran;</p> <p>2. Pengembangan wilayah manajemen kebakaran (WMK) ;</p> <p>3. Pendidikan dan pelatihan pemadam kebakaran tingkat dasar dan lanjutan;</p>

			<p>4. Menambah armada operasional pemadam kebakaran;</p> <p>5. Penyuluhan dan pelatihan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha/swasta.</p>
--	--	--	---

### 3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2022 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2022.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2021 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.22  
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan  
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Temanggung Tahun 2022

RANCANGAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			( + / - )
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
A	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN</b>		A	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN</b>		
1	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>		1	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>		
a	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		a	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	1.500.000		Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	1.500.000	0
b	<b>Administrasi Keuangan</b>		b	<b>Administrasi Keuangan</b>		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.041.656.000		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.041.656.000	0
c	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		c	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		
	Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	128.000.000		Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	127.999.140	860
d	<b>Administrasi Umum</b>		d	<b>Administrasi Umum</b>		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.000.000		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.999.950	50
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	0
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.500.000		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.498.200	1.800
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	94.400.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	94.400.000	0
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.000.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.999.700	300
	Penyediaan bahan/Material	10.000.000		Penyediaan bahan/Material	10.000.000	0
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.983.500	16.500

f	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		f	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Penyediaan jasa surat menyurat	2.000.000		Penyediaan jasa surat menyurat	1.999.800	200
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	70.000.000		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	70.000.000	0
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	8.000.000		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	7.983.900	16.100
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	187.225.000		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	187.224.000	1.000
g	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		g	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	50.000.000		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	50.000.000	0
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	80.000.000		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	79.997.500	0
	Pemeliharaan mebel	2.173.400		Pemeliharaan mebel	2.155.300	18.100
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		
a	<b>Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		a	<b>Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		
	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	20.000.000		Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	20.000.000	0
	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	10.000.000		Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	10.000.000	0
	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	850.000.000		Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	850.000.000	0
	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	0		Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	0	
	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi manusia	50.000.000		Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi manusia	50.000.000	0
	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	75.000.000		Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	75.000.000	0
	Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	0		Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	0	0

	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	10.000.000		Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	10.000.000	0
b	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati</b>		b	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati</b>		
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	80.000.000		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	80.000.000	0
	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>			<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>		
	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	75.683.800		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	77.008.600	-1.324.800
	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	70.000.000		Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	293.383.200	-223.383.200
	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	75.000.000		Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	201.843.400	-126.843.400
	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	1.137.940.800		Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	1.080.520.800	57.420.000
	<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>			<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>		
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	20.000.000		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	30.420.000	-10.420.000
	<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>			<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>		
	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	14.376.000		Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	99.479.000	-85.103.000
	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	100.000.000		Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	0	0
	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	28.274.000		Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	213.467.000	-185.193.000
	<b>Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia</b>			<b>Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia</b>		
	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	20.000.000		Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	18.171.000	1.829.000
	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	90.000.000		Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	136.681.600	-46.681.600

	<b>JUMLAH</b>	<b>8.491.729.000</b>			<b>9.011.371.590</b>		
--	---------------	----------------------	--	--	----------------------	--	--

Sumber : RKPD Kab. Temanggung Tahun 2021

Dari Tabel 3.2. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan pagu indikatif Tahun 2022 sebesar Rp. 12.453.593.794,- Jika dilihat lebih jauh untuk kenaikan Belanja di tahun 2022 dikarenakan adanya pengadaan mobil rescue, pembangunan sumur bor dan ground tank di pos pemadam kebakaran dan adanya pemilihan kepala desa.

Tabel 2.23  
Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Temanggung  
Tahun 2022

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
1 05 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					5.765.397.250						
1 05 1 2.0 1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.500.000					2.500.000	
1 05 1 2.0 1 1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kab Temanggung	15	buku	1.500.000	0	960.000	960.000		2.500.000	DAU
1 05 1 2.0 2	Administrasi Keuangan					5.041.656.000	5.038.690.490	4.769.855.007	4.694.819.504	98,43	6.099.911.480	

1	05	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terperuhnya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Temanggung			5.041.656.000	5.038.690.490	6.099.911.480	5.873.855.518	96,29	6.099.911.480	DA U
					Belanja Pegawai					5.041.656.000	2.383.381.542	6.099.911.480	5.873.855.518	96,29	6.099.911.480	DA U
					Belanja Gaji dan Tunjangan ASN			13	bulan	3.253.993.484	4.736.922.840	4.515.211.480	4.375.780.038	96,91	4.515.211.480	DA U
					Belanja Tambahan Penghasilan ASN			12	bulan	1.787.662.516	1.652.662.516	1.584.700.000	1.498.075.480	94,53	1.584.700.000	DA U
1	05	0 1	2.0 5		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					<b>127.999.400</b>		<b>4.750.000</b>			<b>150.000.000</b>	
1	05	0 1	2.0 5	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas khusus satpol PP	Kab Temanggung	134	stel	127.999.400	0				150.000.000	DA U
												4.750.000	4.750.000	100		DA U
1	05	0 1	2.0 6		<b>Administrasi Umum</b>					<b>194.881.350</b>	<b>88.990.200</b>	<b>120.464.950</b>	<b>115.130.522</b>	<b>95,57</b>	<b>297.500.000</b>	
X	XX	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tercukupinya komponen instalasi listrik dan bangunan kantor	Kab Temanggung	12	bulan	6.999.950	5.824.100	6.749.950	6.744.360	99,92	75.000.000	DA U
X	XX	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya 2 unit laptop	Kab Temanggung	2	unit	15.000.000	0				22.500.000	DA U
X	XX	1	2.0 6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor	Kab Temanggung	3	unit	1.498.200	0	-	-		30.000.000	DA U
X	XX	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK, alat kebersihan kantor, dan makan minum harian pegawai dan makan minum rapat	Kab Temanggung	12	bulan	94.400.000	6.470.500	7.000.000	6.989.500	99,85	50.000.000	DA U
X	XX	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan	Kab Temanggung	12	bulan	6.999.700	3.400.000	4.296.000	3.945.800	91,85	20.000.000	DA U
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						0	660.000	660.000	100		DA U

X	XX	1	2.0 6	07	Penyediaan bahan/Material	Tersedianya bahan/material/bahan bangunan	Kab Temanggung	12	bulan	10.000.000	12.835.500	7.000.000	6.528.600	93,27	10.000.000	DA U
X	XX	1	2.0 6	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya, jamuan makan minum tamu	Kab Temanggung	12	bulan	5.000.000	29.390.000	46.249.000	41.810.000	90,40	10.000.000	DA U
X	XX	1	2.0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab Temanggung	12	bulan	54.983.500	15.472.000	48.510.000	48.452.262	99,88	80.000.000	DA U
1	05	1	2.0 8		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>267.207.700</b>	<b>210.760.000</b>	<b>234.088.796</b>	<b>224.402.407</b>	95,86	<b>275.225.000</b>	
X	XX	1	2.0 8	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kab Temanggung	12	bulan	1.999.800	0	-	-		10.000.000	DA U
X	XX	1	2.0 8	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet	Kab Temanggung	12	bulan	70.000.000	50.000.000	64.998.396	57.566.247	88,57	70.000.000	DA U
X	XX	1	2.0 8	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	Kab Temanggung	12	bulan	7.983.900	0	14.950.000	14.950.000	100	8.000.000	DA U
X	XX	1	2.0 8	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya honor suporting staf, karangan bunga, spanduk/ucapan, dan iklan ucapan selamat, dan pengolahan sampah	Kab Temanggung	12	bulan	187.224.000	160.157.800	154.140.400	151.886.160	98,54	187.225.000	DA U
1	05	1	2.0 9		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>132.152.800</b>	<b>90.312.700</b>	<b>105.515.500</b>	<b>103.545.536</b>	98,13	<b>132.173.400</b>	
X	XX	1	2.0 9	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab Temanggung	12	bulan	50.000.000	69.360.300	105.515.500	103.545.536	98,13	50.000.000	DA U
X	XX	1	2.0 9	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab Temanggung	12	bulan	79.997.500	0	-	-		80.000.000	DA U

			2.0 9	05	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharannya mebel	Kab Temanggung	3	unit	2.155.300					2.173.400	DA U
1	05	0 2	2.0 1		<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>					<b>1.095.000.000</b>				-		
X	XX	0 2	2.0 1		<b>Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>1.015.000.000</b>	<b>920.000.000</b>	<b>1.398.262.000</b>	<b>1.394.743.136</b>	99,75	<b>1.070.000.000</b>	
X	XX	0 2	2.0 1	01	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Terlaksananya patroli, pengamanan dan pengawalan pejabat negara dan daerah	Kab Temanggung	12	bulan	20.000.000	755.000.000	5.013.000	5.013.000	100	20.000.000	DA U
X	XX	0 2	2.0 1	02	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Terlaksananya penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kab Temanggung	12	bulan	10.000.000	144.543.600	10.000.000	9.995.000	99,95	15.000.000	DA U
X	XX	2	2.0 1	03	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Tercukupinya honor SS Banpol 30 orang x 12 bulan, BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan	Kab Temanggung	13	bulan	850.000.000	2.998.000	693.314.000	690.134.136	99,54	850.000.000	DA U
X	XX	2	2.0 1	05	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bermuansa Hak Asasi manusia	Terlaksananya peningkatan kapasitas korsik dan penampilan dalam upacara kenegaraan dan terlaksananya pembinaan linmas tingkat kecamatan se-Kabupaten Temanggung	Kab Temanggung	12	bulan	50.000.000	5.000.000	27.407.000	27.073.000	98,78	100.000.000	DA U

					Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksananya rapat koordinasi danton linmas se- kabupaten temanggung				5.000.000						
X	XX	2	2.0 1	07	Kerjasama antar 91erjasa dan kemitraan dalam 91erjas pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksananya 91erjasama antar instansi dalam penanganan PKL dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lainnya	Kab Temanggung	12	bulan	75.000.000				75.000.000		DA U
		2	2.0 1	09	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Terlaksananya penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Kab Temanggung	12	bulan	10.000.000				10.000.000		DA U
					Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota	Terlaksananya sosialisasi perda dan perbup				45.609.200						
1	05	0 2	2.0 2		<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota</b>					<b>80.000.000</b>	<b>227.297.500</b>	<b>82.017.980</b>	<b>75.947.208</b>	92,60	<b>80.000.000</b>	
1	5	2	2.0 2	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Tertanganinya pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota	Kab Temanggung	12	bulan	80.000.000		18.732.980	18.721.908	99,94	80.000.000	DA U
					<b>Program penanggulangan bencana</b>					<b>340.607.000</b>						
					<b>Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</b>					<b>340.607.000</b>						
					Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Edukasi dan penegakan protocol Kesehatan dalam pencegahan dan penanganan wabah covid 19				340.607.000						



1	05	04	2.02		<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>					<b>30.420.000</b>	<b>9.026.000</b>					
1	5	2	2.02	1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Terdatanya kualitas dan kuantitas sarpras proteksi kebakaran di Instansi Pemerintah, Instansi Swasta atau pemukiman masyarakat	Kab Temanggung	36	instansi	30.420.000	9.026.000			20.000.000		DAU
1	05	04	2.04		<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>					<b>312.946.000</b>	<b>7.559.000</b>					
1	5	04	2.04	01	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kejadian kebakaran (hasil musrenbang untuk pelatihan Rp. 14.807.000 )	Kab Temanggung	12	bulan	99.479.000	7.559.000			14.376.000		DAU
1	5	04	2.04	03	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Terbentuknya relawan kebakaran disetiap desa/kelurahan se-Kabupaten Temanggung (tambah hasil musrenbang untuk pembelian alat proteksi kebakaran Rp. 172.868.000 )	Kab Temanggung	150	desa/kelurahan	213.467.000		32.349.000	31.784.900	98,26	28.274.000	DAU
1	05	04	2.05		<b>Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia</b>					<b>154.852.600</b>	<b>0</b>					
1	5	04	2.05	1	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Terlayannya operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia seperti operasi tangkap tawon, oli/solar tumpah, tanah longsor, penanganan hewan berbisa dll	Kab Temanggung	12	bulan	18.171.000	0	98.950.000	92.851.000	93,84	20.000.000	DAU

1	5	0	2.0	3	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Terpenuhinya standarisasi sarpras dan terlindunginya keselamatan petugas damkar dalam penanganan pencarian serta pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Kab Temanggung	12	bulan	136.681.600	0				90.000.000
					<b>JUMLAH DAU</b>					<b>9.011.371.590</b>	<b>8.381.960.890</b>	<b>7.992.394.233</b>	<b>7.645.666.752</b>		<b>9.738.584.000</b>
					<b>JUMLAH DBHCHT</b>					<b>0</b>	<b>150.000.000</b>	<b>63.285.000</b>	<b>57.225.300</b>	<b>90</b>	<b>160.000.000</b>
					<b>JUMLAH DAK</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>JUMLAH TOTAL</b>					<b>9.011.371.590</b>	<b>8.456.033.331</b>	<b>8.055.679.233</b>	<b>7.702.892.052</b>		<b>9.898.584.000</b>

Temanggung, 7 September 2021  
 KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR  
 KABUPATEN TEMANGGUNG

**Drs. EDY CAHYADI, M.M**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP.19730619 199303 1 003

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2022 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2022 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 98,42 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar 93,16 % sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 12,91 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar 9,54 %.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2022 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 12.453.593.794,- yang terdiri dari 3 ( Tiga ) program antara lain program penunjang urusan pemerintahan daerah;

program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum; program pencegahan penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, Juni 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA DAN PEMADAM  
KEBAKARAN KABUPATEN  
TEMANGGUNG



**Drs. EDY CAHYADI, M.M.**

Pendaha Tingkat I

NP. 19730619 199303 1 003